



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RINDA DESIANTI, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. AULIA RAHMAN BASRI, M. Kes**

Jabatan : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



dr. AULIA RAHMAN BASRI, M. Kes

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS



RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196912262001122002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	73,53
2	Meningkatnya keberdayaan dan kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam menjalankan fungsi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Sasaran SPM yang terpenuhi Kebutuhannya	Persen	100
3	Meningkatnya Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persen	100
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
5	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
7	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp15.020.568.119,00	APBD
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp5.238.927.000,00	APBD
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp4.328.564.618,00	APBD
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp1.199.780.000,00	APBD
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp898.148.530,00	APBD
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp3.377.116.425,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp30.063.104.692,00	

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



dr. AULIA RAHMAN BASRI M. Kes

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS



RINDA DESIAN T.S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196912262001122002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. AULIA RAHMAN BASRI, M. Kes**

Jabatan : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



dr. AULIA RAHMAN BASRI, M. Kes

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA DINAS



Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196807081994031013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	73,53
2	Meningkatnya keberdayaan dan kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam menjalankan fungsi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Sasaran SPM yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100
3	Meningkatnya Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persen	100
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
5	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
7	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp15.020.568.119,00	APBD
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp5.238.927.000,00	APBD
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp4.328.564.618,00	APBD
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp1.199.780.000,00	APBD
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp898.148.530,00	APBD
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp3.377.116.425,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp30.063.104.692,00	

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,

DUPATI KUTAI KARTANEGARA



dr. AULIA RAHMAN BASRI, M. Kes

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA DINAS



Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196807081994031013



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs.YULIANDRIS SUHERDIMAN**

Jabatan : **SEKRETRARIS**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RINDA DESIANTI, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

BINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196912262001122002

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

Drs.YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina TKI (IV/b)
NIP. 196912262001122002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Pemenuhan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Jumlah data dukung	Dokumen	54
2	Melakukan koordinasi dalam pemenuhan data Dukung keberdayaan dan kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam menjalankan fungsi sosial	Jumlah koordinasi	Kegiatan	8
3	Koordinasi Pemenuhan Data Dukung Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Koordinasi	Kegiatan	8
4	Koordinasi Pemenuhan Data Dukung Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah koordinasi dalam pemenuhan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Kegiatan	6
5	Koordinasi Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Koordinasi Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	12
6	Koordinasi Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Sekretariat	Jumlah Koordinasi Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko Sekretariat PerTriwulan	Kegiatan	4
7	Koordinasi Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah Koordinasi Tingkat keterisian Data Sekretariat Prioritas Tahunan	Kegiatan	4
8	Koordinasi Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau Sekretariat	Jumlah Koordinasi Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Sekretariat dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Kegiatan	12

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp.15.020.568.119,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.15.020.568.119,00	APBD

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

RINDA DESIANTI S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196912262001122002

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

Drs.YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 196912262001122002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD FAHRUJI, ST., MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN**
Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 02 Januari 2026

Pihak Kedua,
Pit KEPALA,


Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. 1 (IV/b)
Nip. 19680708 199403 1 013

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG LINJAMSOS


AHMAD FAHRUJI ST. MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19781208 200902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya peningkatan Kesejahteraan Sosial yang inklusif kewenangan bidang Linjamsos	Jumlah Data Dukung	Dokumen	12
2	Terlaksananya keberdayaan dan kemampuan PPKS dalam menjalankan fungsi sosial kewenangan bidang Linjamsos	Jumlah layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Sasaran SPM yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dibidang linjamsos	Orang	529
3	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Linjamsos	Jumlah Data Dukung	Dokumen	4
4	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kewenangan bidang Linjamsos	Jumlah Laporan	Dokumen	12

5	Terlaksana Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan kewenangan bidang Linjamsos	Jumlah Dokumen Pendukung	Dokumen	12
6	Terlaksananya dokumen manajemen resiko bidang Linjamsos	Jumlah Dokumen Manajemen Resiko Bidang linjamsos Per triwulan	Dokumen	4
7	Terlaksana Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan kewenangan bidang Linjamsos	Tingkat Keterisian Data Dukung	Prosentase	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau Bidang Linjamsos	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Linjamsos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Prosentase	100

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pemeliharaan Anak Terlantar	396.288.000,00	APBD
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupate/ Kota	803.492.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		1.199.780.000,00	APBD

Kutai Kartanegara, 02 Januari 2026

Pihak Kedua,
Pit. KEPALA,


Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19680708 199403 1 013

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG LINJAMSOS


AHMAD FAHRUL ST. MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19781208 200902 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pemeliharaan Anak Terlantar	396.288.000,00	APBD
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupate/ Kota	803.492.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		1.199.780.000,00	APBD

Kutai Kartanegara, 02 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS,

RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 196912262001122002

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG LINJAMSOS

MUHAMAD IAPAR, S.Sos., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196907051989031008

5	Terlaksana Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan kewenangan bidang Linjamsos	Jumlah Dokumen Pendukung	Dokumen	12
6	Terlaksananya dokumen manajemen resiko bidang Linjamsos	Jumlah Dokumen Manajemen Resiko Bidang linjamsos Per triwulan	Dokumen	4
7	Terlaksana Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan kewenangan bidang Linjamsos	Tingkat Keterisian Data Dukung	Prosentase	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau Bidang Linjamsos	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Linjamsos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Prosentase	100

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya peningkatan Kesejahteraan Sosial yang inklusif kewenangan bidang Linjamsos	Jumlah Data Dukung	Dokumen	12
2	Terlaksananya keberdayaan dan kemampuan PPKS dalam menjalankan fungsi sosial kewenangan bidang Linjamsos	Jumlah layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Sasaran SPM yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dibidang linjamsos	Orang	529
3	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Linjamsos	Jumlah Data Dukung	Dokumen	4
4	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kewenangan bidang Linjamsos	Jumlah Laporan	Dokumen	12

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 09 Pebruari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS,

RINDA DESIAN TI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 196912262001122002

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG LINJAMSOS

MUHAMAD IAPAR, S.Sos., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196907051989031008



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIADI HADIWINOTO, S. Hut**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang saya pimpin.
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat pada jenis layanan **Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana**.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik pada jenis layanan **Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana**

Bagi Korban Bencana.

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

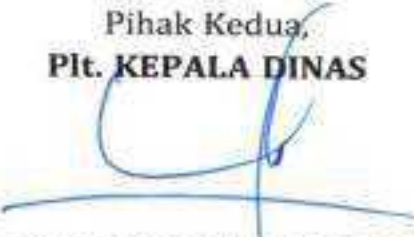
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS


Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196807081994031013

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PKBPTMP


RIADI HADIWINOTO, S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif Kebencanaan	Indeks Risiko Bencana	Nilai	120
2	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana	Jumlah Masyarakat Korban Bencana yang tercukupi kebutuhan dasarnya	Orang	1500
3	Meningkatkan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban bencana	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban Bencana	Persen	100
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Penanganan Korban bencana dan Pengelolaan TMP	Jumlah Pelayanan kepada masyarakat korban bencana	Kegiatan	50
5	Tersedianya dokumen Perencanaan, Pedoman, Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Bidang Penanganan Korban bencana dan Pengelolaan TMP	Jumlah Dokumen Tingkat Kematangan Organisasi Bidang PKBPTMP	Dokumen	50
6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Bidang Penanganan Korban bencana dan Pengelolaan TMP	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko bidang PKBPTMP per Triwulan	Dokumen	4
7	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan pada Bidang PKBPTMP	Persen	100

	dipertanggungjawabkan pada bidang PKBPTMP			
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau Bidang Penanganan Korban bencana dan Pengelolaan TMP	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 898.148.530,00	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp. 3.377.116.425,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 4.275.264.955,00	

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS


Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. NIP. 196807081994031013

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PKBPTMP


RIADI HADIWINOTO S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. NIP. 196812212003121002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIADI HADIWINOTO, S. Hut**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang saya pimpin.
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat pada jenis layanan **Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana**.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik pada jenis layanan **Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana**

Bagi Korban Bencana.

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

RINDA DESIANTI S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196912262001122002

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PKBPTMP


RIADI HADIWINOTO, S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif Kebencanaan	Indeks Risiko Bencana	Nilai	120
2	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana	Jumlah Masyarakat Korban Bencana yang tercukupi kebutuhan dasarnya	Orang	1500
3	Meningkatkan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban bencana	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban Bencana	Persen	100
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Penanganan Korban bencana dan Pengelolaan TMP	Jumlah Pelayanan kepada masyarakat korban bencana	Kegiatan	50
5	Tersedianya dokumen Perencanaan, Pedoman, Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Bidang Penanganan Korban bencana dan Pengelolaan TMP	Jumlah Dokumen Tingkat Kematangan Organisasi Bidang PKBPTMP	Dokumen	50
6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Bidang Penanganan Korban bencana dan Pengelolaan TMP	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko bidang PKBPTMP per Triwulan	Dokumen	4
7	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan pada Bidang PKBPTMP	Persen	100

	dipertanggungjawabkan pada bidang PKBPTMP			
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau Bidang Penanganan Korban bencana dan Pengelolaan TMP	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 898.148.530,00	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp. 3.377.116.425,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 4.275.264.955,00	

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

RINDA DESIANTI.S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196912262001122002

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PKBPTMP


RIADI HADIWINOTO. S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. NIP. 196812212003121002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,

PLT. KEPALA DINAS



Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680708 199403 1 013

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL



LUCY YULIDASARI, M.Psi

Pembina (IV/a)

NIP. 19750717 200801 2 028

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indek	73,53
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
3.	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
4.	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
5.	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
6.	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.238.927.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 5.238.927.000,-	

Pihak Pertama,

PLT. KEPALA DINAS


Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680708 199403 1 013

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi

Pembina (IV/a)

NIP. 19750717 200801 2 028



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SY. GINA FATHILLAH, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 6 Pebruari 2026

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS

KEPALA BIDANG

PEMBERDAYAAN SOSIAL



RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691226 200112 2 002



SY. GINA FATHILLAH, SE., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19681018 199603 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indek	73,53
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
3.	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
4.	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
5.	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
6.	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.238.927.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 5.238.927.000,-	

Kutai Kartanegara, 6 Pebruari 2026

Pihak Pertama,

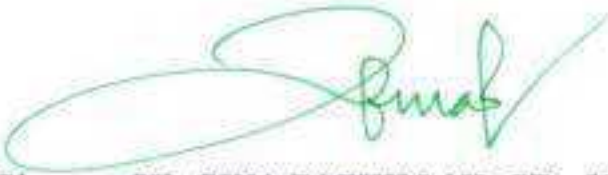
Pihak Kedua,

KEPALA DINAS

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL


RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691226 200112 2 002


SY. GINA FATHILLAH, SE., M.Si

Pembina (IV/a)
NIP. 19681018 199603 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUNARKO, SST.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN
PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK
KEKERASAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL



Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Pembina Tk.I
NIP. 196807081994031013

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL
DAN PENANGANAN WARGA NEGARA
MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**



SUNARKO, ST., M.Si

Pembina
NIP.197109071994011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terpenuhinya Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif kewenangan Bidang Rehabilitasi Sosial	Jumlah Data Dukung	Laporan	5
2	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar PPKS sasaran SPM diluar panti sosial	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar PPKS sasaran SPM diluar panti sosial	Persen	100
3	Meningkatnya Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Indeks pencapaian Penerapan SPM	Persen	100
4	Tersedianya data dukung Kualitas Pelayanan Publik dibidang Rehabilitasi Sosial	Jumlah data dukung Kualitas Pelayanan Publik	Dokumen	6
5	Terpenuhinya Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik Bidang Rehsos	Jumlah Dokumen Tingkat Kematangan Organisasi Bidang Rehsos	Dokumen	10

6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Bidang Rehsos	Jumlah Laporan. Dokumen Pengelolaan Risiko	Dokumen	4
7	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan Bidang Rehsos	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Rehsos	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau Bidang Rehsos	Tingkat Ketepatan waktu input e-pantau dan telah diverifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Permakanan	3.313.983.830,00	
2	Penyediaan Sandang	284.529.015,00	
3	Penyediaan Alat Bantu	372.046.853,00	
4	Pemerian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	127.256.661,00	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	130.000.000,00	
3	Pemberian Layanan Kedaruratan	52.092.000,00	
4	Pemberian Layanan Rujukan	48.656.259,00	
JUMLAH ANGGARAN		4.328.564.618,00	

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Sosial



Drs. Yuliandris Suherdiman
Pembina Tk.I, IV/b
NIP.196807081994031013

Pihak Pertama,
**Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan
Penanganan Warga Negara migran
Korban Tindak Kekerasan**



Sunarko, SST., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 197109071994011002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUNARKO, SST.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN
PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK
KEKERASAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RINDA DESIANTI, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terpenuhinya Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif kewenangan Bidang Rehabilitasi Sosial	Jumlah Data Dukung	Laporan	5
2	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar PPKS sasaran SPM diluar panti sosial	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar PPKS sasaran SPM diluar panti sosial	Persen	100
3	Meningkatnya Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Indeks pencapaian Penerapan SPM	Persen	100
4	Tersedianya data dukung Kualitas Pelayanan Publik dibidang Rehabilitasi Sosial	Jumlah data dukung Kualitas Pelayanan Publik	Dokumen	6
5	Terpenuhinya Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik Bidang Rehsos	Jumlah Dokumen Tingkat Kematangan Organisasi Bidang Rehsos	Dokumen	10

6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Bidang Rehsos	Jumlah Laporan Pengelolaan Risiko	Dokumen	4
7	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan Bidang Rehsos	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Rehsos	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau Bidang Rehsos	Tingkat Ketepatan waktu input e-pantau dan telah diverifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS SOSIAL


RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196912262001122002

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL
DAN PENANGANAN WARGA NEGARA
MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**


SUNARKO, SST., M.Si
Pembina
NIP. 197109071994011002

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Permakanan	3.313.983.830,00	
2	Penyediaan Sandang	284.529.015,00	
3	Penyediaan Alat Bantu	372.046.853,00	
4	Pemerian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	127.256.661,00	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	130.000.000,00	
3	Pemberian Layanan Kedaruratan	52.092.000,00	
4	Pemberian Layanan Rujukan	48.656.259,00	
JUMLAH ANGGARAN		4.328.564.618,00	

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial

RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP.196912262001122002

Pihak Pertama,
**Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan
 Penanganan Warga Negara migran
 Korban Tindak Kekerasan**

Sunarko, SST., M.Si
 Pembina, IV/a
 NIP. 197109071994011002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SERAPUL ANAM, SE.MM**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;

6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

Sekretaris,

Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Pembina Tk.I IV/b
NIP. 196807081994031013

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketalaksanaan dan Kepegawaian**

SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina, IV/a
NIP. 196810111994031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Pemenuhan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Jumlah data dukung	27	Dokumen
2	Pemenuhan Saprass Pendukung Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah saprass dalam pemenuhan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1	Laporan
3	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Pemenuhan dokumen Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	4	Dokumen
4	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Umtapeg	Jumlah Laporan Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko Umtalpeg PerTriwulan	4	Dokumen
5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau Sekretariat	Jumlah Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Sekretariat dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	17	Kegiatan

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	112.200.000,00	
3.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	21,913,200.00	
4.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50,000,000.00	
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Pencerangan Bangunan Kantor	5,110,200.00	
6.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,774,100.00	
7.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,000,000.00	
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60,000,000.00	
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62,426,000.00	
10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500,000,000.00	
11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13,213,600.00	
12.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250,000,000.00	
13.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	565,315,296.00	
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,000,000.00	
15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83,950,628.00	
16.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000.00	
17.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	800,000,000.00	
JUMLAH ANGGARAN		2,746,903,024.00	

Kutai Kartanegara, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

Sekretaris,

Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Pembina Tk.IV/b

NIP. 196807081994031013

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Umum, Ketelaksanaan dan Kepegawaian

SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina, IV/a

NIP. 196810111994031007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADI SAFITRI RAMDHANI,SE,M.SI
Jabatan : PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

ADI SAFITRI RAMDHANI, SE, M. SI
Penata (IV/a)
NIP. 19790817 200112 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif kewenangan bidang Dayasos	Jumlah Data dukung	Dokumen	1
2	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Penyuluhan Sosial)	Jumlah Pelayanan Publik yang terlayani	Dokumen	6
3	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik Bidang Dayasos	Jumlah Dokumen Tingkat Kematangan Organisasi Bidang Dayasos	Dokumen	12
4	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Bidang Dayasos	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko Bidang Dayasos PerTriwulan	Dokumen	4
5	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-kabupaten Kutai Kartanegara)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
6	Tersedianya Table Prognosis untuk Terlaksananya Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717/200801 2 028

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA


ADI SAFITRI RAMDHANI, SE, M.SI
Penata (IV/a)
NIP. 19790817/200112 1 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADI SAFITRI RAMDHANI,SE,M.SI
Jabatan : PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SY GINA FATHILLAH, SE, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 09 Pebruari 2026

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA



SY GINA FATHILLAH, SE, M.SI

Pembina (IV/a)

NIP. 19681018199603 2 004

ADI SAFITRI RAMDHANI, SE, M.SI

Penata (IV/a)

NIP. 19790817 200112 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif kewenangan bidang Dayasos	Jumlah Data dukung	Dokumen	1
2	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Penyuluhan Sosial)	Jumlah Pelayanan Publik yang terlayani	Dokumen	6
3	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik Bidang Dayasos	Jumlah Dokumen Tingkat Kematangan Organisasi Bidang Dayasos	Dokumen	12
4	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Bidang Dayasos	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko Bidang Dayasos PerTriwulan	Dokumen	4
5	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-kabupaten Kutai Kartanegara)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
6	Tersedianya Table Prognosis untuk Terlaksananya Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL



SY GINA FATHILLAH, SE, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19681018199603 2 004

Kutai Kartanegara, 09 Pebruari 2026

Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA



ADI SAFTIRI RAMDHANI, SE, M.Si

Penata (IV/a)

NIP. 19790817 200112 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUKANDAR, SST.,MPSSp**

Jabatan : **KEPALA UPT. LOKA BINA KARYA DINAS SOSIAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

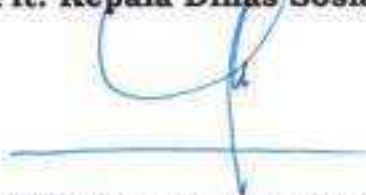
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

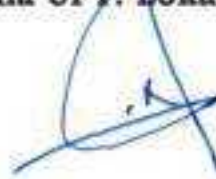
Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

**Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Sosial**



Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tingkat I/ IV/b
NIP. 196807081994031013

**Pihak Pertama,
Kepala UPT. Loka Bina Karya**



SUKANDAR, SST., MPSSp
Pembina / IV/a
NIP. 196804141992011004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam menjalankan fungsi sosial	Jumlah pelayanan	Kegiatan	4
2	Pemenuhan Data Dukung Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah data PPKS yang terlayani	Dokumen	4
3	Pemenuhan Data Dukung Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah dokumen pendukung dalam pemenuhan Pelayanan Publik Di UPTD Loka Bina Karya	Dokumen	5
4	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah Dokumen pendukung Tingkat Kematangan Organisasi UPTD Loka Bina Karya	Dokumen	5
5	Pemenuhan Dokumen Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Persentase ketersediaan data Prioritas Tahunan UPTD Loka Bina Karya	Persen	100

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Sosial



Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tingkat I/ IV/b
NIP. 196807081994031013

Pihak Pertama,
Kepala UPT. Loka Bina Karya



SUKANDAR, SST., MPSSp
Pembina / IV/a
NIP. 196804141992011004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZEIN WAHYUDI PASA, S.P.

Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

**Pihak Kedua,
SEKRETARIS**

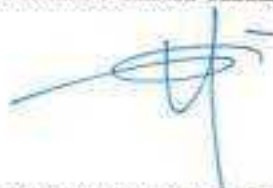


DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 1968070819940031013

**Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI MUDA**



ZEIN WAHYUDI PASA, S.P.

Penata Tk. 1 (III/d)

NIP. 197309282001121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Pemenuhan Data Dukung Sekretariat / Program Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Jumlah data dukung	Dokumen	4
2	Pengolahan data keberdayaan dan kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam menjalankan fungsi sosial	Persentase data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sasaran SPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100
3	Menyusun Perencanaan Kebijakan Strategis Jangka Pendek	Jumlah Pemenuhan Data Dukung Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Dokumen	5
4	Menghimpun Dokumen Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah laporan ketersediaan dokumen Manajemen Risiko Perangkat Daerah per Triwulan	Laporan	4
5	Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Melalui Aplikasi E-Pantau	Laporan	12
6	Pengolahan Data Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persentase pengolahan data dukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persen	100
7	Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan bidang urusan sosial	Dokumen Rancangan Rencana Anggaran dan Pembiayaan	Dokumen	2

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
8	Menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral	Dokumen rencana program dan kegiatan sektoral	Dokumen	2
9	Memformulasikan sajian untuk analisis	Laporan formulasi sajian analisis	Laporan	4

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL**

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		50.000.000,-	APBD

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

**Pihak Kedua,
SEKRETARIS**

DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN

**Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 196807081994031013**

**Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI MUDA**

ZEIN WAHYUDI PASA, S.P.

**Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 197309282001121003**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOHD. ERWINSYAH. SE**
Jabatan : **PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI. ST.,MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan, (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FAHRUJI. ST.,MM

Pembina/IV/a

NIP. 19781208 2009021001

Pihak Pertama,
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA



MOHD. ERWINSYAH. SE

Penata TK.1/III/d

NIP. 198212152002121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif Kewenangan Bidang Linjamsos	Jumlah Data Dukung	Dokumen	8
2	Terlaksananya Keberdayaan dan Kemampuan PPKS Dalam Menjalankan Fungsi Sosial Kewenangan Bidang Linjamsos	Jumlah PPKS Yang di Tangani	Orang	500
3	Pemenuhan Data Dukung Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Linjamdsos	Jumlah Data Dukung	Dokumen	1
4	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung Yang Efektif, Akuntabel, dan Adaptif Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kewenangan Bidang Linjamsos	Jumlah Dokumen Pendukung Kematangan Organisasi Bidang Linjamsos	Dokumen	8
5	Terlaksananya Dokumen Manajemen Resiko Bidang Linjamsos	jumlah dokumen Manajemen Resiko Bidang linjamsos Per triwulan	Dokumen	4

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	
2	-	-	
3	-	-	
JUMLAH ANGGARAN			

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FAHRUJI. ST.,MM
Pembina/IV/a
NIP. 19781208 2009021001

Pihak Pertama,
PEKRJA SOSIAL AHLI MUDA



MOHD. ERWINSYAH. SE
Penata TK.1/III/d
NIP. 198212152002101003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOHD. ERWINSYAH. SE**
Jabatan : **PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMAD JAPAR. S.Sos.,M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan, (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**



MUHAMAD JAPAR. S.Sos., M.Si
Pembina TK.1/IV/b
NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA



MOHD. ERWINSYAH. SE
Penata TK.1/III/d
NIP. 198212152002121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

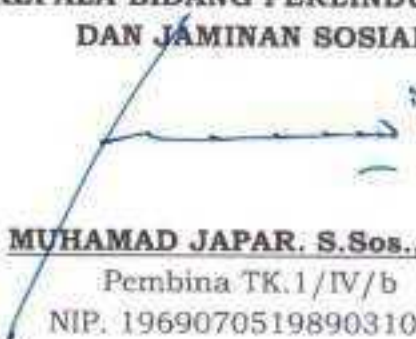
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif Kewenangan Bidang Linjamsos	Jumlah Data Dukung	Dokumen	8
2	Terlaksananya Keberdayaan dan Kemampuan PPKS Dalam Menjalankan Fungsi Sosial Kewenangan Bidang Linjamsos	Jumlah PPKS Yang di Tangani	Orang	500
3	Pemenuhan Data Dukung Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Linjamsos	Jumlah Data Dukung	Dokumen	1
4	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung Yang Efektif, Akuntabel, dan Adaptif Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kewenangan Bidang Linjamsos	Jumlah Dokumen Pendukung Kematangan Organisasi Bidang Linjamsos	Dokumen	8
5	Terlaksananya Dokumen Manajemen Resiko Bidang Linjamsos	jumlah dokumen Manajemen Resiko Bidang linjamsos Per triwulan	Dokumen	4

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	
2	-	-	
3	-	-	
JUMLAH ANGGARAN			

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**


MUHAMAD JAPAR. S.Sos., M.Si
Pembina TK.1/IV/b
NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
PEKRJA SOSIAL AHLI MUDA


MOHD. ERWINSYAH. SE
Penata TK.1/III/d
NIP. 198212152002101003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AKHMAD RIFANI, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RIADI HADIWINOTO, S. Hut**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Melaksanakan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
2. Melaksanakan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat pada jenis layanan **Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana**.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik pada jenis

layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana.

4. Melaksanakan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PKBPTMP



RIADI HADIWINOTO, S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA



AKHMAD RIFANI, S.Sos., M.Si
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 198108132006041013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Penyaluran Bantuan Korban Bencana	Jumlah masyarakat Korban bencana yang mendapat bantuan	Orang	200
2	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban bencana	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban Bencana	Persen	100
3	Pemberian Pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Pelayanan yang diberikan	Kegiatan	24
4	Tersedianya dokumen Perencanaan, Pedoman, Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Bidang PKBPTMP	Jumlah dokumen	Dokumen	50
5	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Bidang PKBPTMP	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko Bidang PKBPTMP per Triwulan	Dokumen	4
6	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan pada bidang PKBPTMP	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan pada Bidang PKBPTMP	Persen	100
7	Penyediaan data Laporan keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan	Jumlah Laporan	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PKBPTMP



RIADI HADIWINOTO, S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA



AKHMAD RIFANI, S.Sos., M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198108132006041013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOHD.ERY FAISYAL, S.Sos.,M.Si**
Jabatan : **ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs.YULIANDRIS SUHERDIMAN**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan Masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan public;
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Pembina TK.I/ IV b
NIP. 19680708 199403 1 013

Pihak Pertama,
ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA



MOHD.ERY FAISYAL, S.Sos., M.Si

Penata TK.I/ III d
NIP. 19790516 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Kegiatan Pemenuhan Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	15
2	Menganalisis Proses Administrasi Kepegawaian Pensiun, Taspen, Tapera dan Korpri Aparatur Sipil Negara (ASN).	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian terproses	Dokumen	8
3	Menganalisis Proses Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN).	Jumlah Dokumen Kenaikan Pangkat ASN terproses	Dokumen	4
4	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaiaan Rekapitulasi Kehadiran, Gaji ASN, TPP, SKP, Pemberian Sangsi dan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaiaan yang terproses	Dokumen	24
5	Menganalisis, Menyusun Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ANJAB ABK), Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Peta Jabatan	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ANJAB ABK), Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Peta Jabatan	Dokumen	3

6	Menganalisis Proses Administrasi Kepegawaiaan Cuti ASN	Jumlah Dokumen Cuti ASN terproses	Dokumen	10
7	Proses Approval,update dan verifikasi data ASN pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian SIMPEG Dan MyASN	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Aplikasi	2
8	Menganalisis Proses Administrasi Kepegawaian Kenaikan Gaji Berkala (KGB) ASN	Jumlah Dokumen Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terproses	Dokumen	20

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.12.223.665.095,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.12.223.665.095,-	APBD

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Pembina TK.I / IV b

NIP. 19680708 199403 1 013

Pihak Pertama,
ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA



MOHD.ERY FAISYAL, S.Sos., M.Si

Penata TK.I / III d

NIP. 19790516 200112 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
NAMA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIWIEK WIDYANINGSIH, S.IK, Humas**
Jabatan : **Kasubag. TU. UPTD.PSAA. Odah Ngasoh Kanak**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **KUN DWI ROHMANI, S.Sos**
Jabatan : **Kepala UPTD.PSAA. Odah Ngasoh Kanak**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

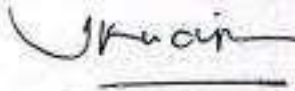
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

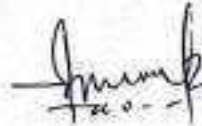
Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala UPTD.PSAA.Odah Ngasoh
Kanak**



Kun Dwi Rohmani, S.Sos
Penata Tk. I – III/d
NIP. 196802227 199402 2 002

Pihak Pertama,
**Kasubag. TU. UPTD.PSAA. Odah
Ngasoh Kanak**



Wiwiek Widyaningsih, S.IK, Humas
Penata Tk. I – III/d
NIP. 19780907 201101 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSRI, SE
Jabatan : PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

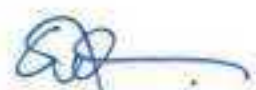
Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA


LUCY YULIDASARI, M.Psi

Pembina (IV/a)

NIP. 19750717 200801 2 028


YUSRIL SE

Penata (III/c)

NIP. 19790416 200701 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif kewenangan bidang Dayasos	Jumlah Data dukung	Dokumen	1
2	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Penyuluhan Sosial)	Jumlah Pelayanan Publik yang terlayani	Dokumen	6
3	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik Bidang Dayasos	Jumlah Dokumen Tingkat Kematangan Organisasi Bidang Dayasos	Dokumen	12
4	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data PSKS Bidang Dayasos)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
5	Tersedianya Table Prognosis untuk Terlaksananya Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026
Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA


YUSRIL SE
Penata (III/c)
NIP. 19790416 200701 1 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSRI, SE
Jabatan : PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SY. GINA FATHILLAH, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


SY. GINA FATHILLAH, SE., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19681018 199603 2 004

Kutai Kartanegara, 9 Pebruari 2026

Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA


YUSRI SE

Penata (III/c)

NIP. 19790416 200701 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif kewenangan bidang Dayasos	Jumlah Data dukung	Dokumen	1
2	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Penyuluhan Sosial)	Jumlah Pelayanan Publik yang terlayani	Dokumen	6
3	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik Bidang Dayasos	Jumlah Dokumen Tingkat Kematangan Organisasi Bidang Dayasos	Dokumen	12
4	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data PSKS Bidang Dayasos)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
5	Tersedianya Table Prognosis untuk Terlaksananya Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL



SY. GINA FATHILLAH, SE., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19681018 199603 2 004

Kutai Kartanegara, 9 Pebruari 2026
Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA



YUSRI, SE
Penata (III/c)
NIP. 19790416 200701 1 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUS SOFIAN, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUKANDAR, SST., MPSSp**
Jabatan : **KEPALA UPT. LOKA BINA KARYA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala UPT. Loka Bina Karya**



**SUKANDAR, SST.,MPSSp
Pembina / IV/a
NIP. 19680414 199201 1 004**

**Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha**



**AGUS SOFIAN, SE
Penata Muda Tingkat I / III/b
NIP. 19801204 200902 1 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya administrasi pelayanan rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam menjalankan fungsi sosial	Jumlah pelayanan Administrasi	Kegiatan	4
2	Pemenuhan Data Dukung Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah data PPKS yang terlayani	Dokumen	4
3	Pemenuhan Data dukung Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah dokumen pendukung dalam pemenuhan Pelayanan Publik Di UPTD Loka Bina Karya	Dokumen	5
4	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah Dokumen pendukung Tingkat Kematangan Organisasi UPTD Loka Bina Karya	Dokumen	5

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala UPT. Loka Bina Karya



SUKANDAR, SST., MPSSp
Pembina / IV/a
NIP. 19680414 199201 1 004

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



AGUS SOFIAN, SE
Penata Muda Tingkat I / III/b
NIP. 19801204 200902 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL KHAIR, S.Sos., M.Si
Jabatan : PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,
PENELAAH TEKNIS KEBUJAKAN


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028


ABDUL KHAIR, S.Sos., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 196812112001121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Jumlah Data dukung	Dokumen	4
2	Pemenuhan data dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah Dokumentasi Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data PSM, dan LK3)	Tingkat keterisian Data Bidang Dayasos Prioritas Tahunan	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

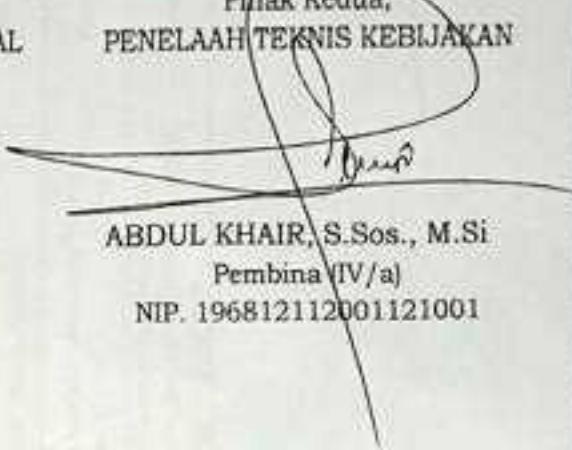
SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026
Pihak Kedua,
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN


ABDUL KHAIR, S.Sos., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 196812112001121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL KHAIR, S.Sos., M.Si
Jabatan : PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SY GINA FATHILLAH, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



SY. GINA FATHILLAH, SE., MSI
Pembina (IV/a)
NIP. 196810181996032004



ABDUL KHAIR, S.Sos., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 196812112001121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Jumlah Data dukung	Dokumen	4
2	Pemenuhan data dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah Dokumentasi Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data PSM, dan LK3)	Tingkat keterisian Data Bidang Dayasos Prioritas Tahunan	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


SY. GINA FATHILLAH, SE., MSI
Pembina (IV/a)
NIP. 196810181996032004

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026

Pihak Kedua,
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN


ABDUL KHAIR, S.Sos., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 196812112001121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : USMANSYAH EFFENDI, SST,MM

Jabatan : PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RIADI HADIWINOTO, S. Hut

Jabatan : KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MMAKAM PAHLAWAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak

Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan .
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat pada jenis layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks

Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik pada jenis layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana.

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja

dari perjanjian ini.

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PKBPTMP



RIADI HADIWINOTO, S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
PENALAAH TEKNIS KEBIJAKAN



USMANSYAH EFFENDY, SST.MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19690101199411002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Penyaluran Bantuan korban bencana	Jumlah Masyarakat Korban Bencana yang mendapat Bantuan	Orang	200
2	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan korban Bencana	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban Bencana	Persen	100
3	Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah Pelayanan yang di berikan	Kegiatan	24
4	Tersedianya dokumen Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen	Dokumen	50
5	Penyadia Data Laporan SPJ Individu	Jumlah Laporan	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PKBPTMP



RIADI HADIWINOTO, S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



USMANSYAH EFFENDY, SST.MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19690101199411002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EKA PUTRA, SE**

Jabatan : **Pengolah Data dan Informasi**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AGUS SOFIAN, SE**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT. Loka Bina Karya Dinas Sosial**



AGUS SOFIAN, SE
Penata Muda Tingkat I / III/b
NIP. 19801204 200902 1 001

**Pihak Pertama,
Pengolah Data dan Informasi
UPT. Loka Bina Karya Dinas Sosial**



EKA PUTRA, SE
Penata Tingkat I / III/d
NIP. 19741118 200012 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya administrasi pelayanan rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam menjalankan fungsi sosial	Jumlah pelayanan bimbingan fisik mental, sosial dan spritual	Kegiatan	12
2	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Publik Di UPTD Loka Bina Karya	Kegiatan	12
3	Pegolahan dan pendataan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah Pegolahan dan pendataan Data Dokumen pendukung Tingkat Kematangan Organisasi UPTD Loka Bina Karya	Dokumen	5

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT. Loka Bina Karya Dinas Sosial



AGUS SOFIAN, SE
Penata Muda Tingkat I / III/b
NIP. 19801204 200902 1 001

Pihak Pertama,
Pengolah Data dan Informasi
UPT. Loka Bina Karya Dinas Sosial



EKA PUTRA, SE
Penata Tingkat I / III/d
NIP. 19741118 200012 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FARIDA, S.Sos**
Jabatan : **Pengolah Data dan Informasi**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUNARKO, SST., M.SI**
Jabatan : **Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

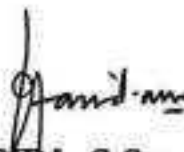
Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
dan Penanganan Warga Negara
Migran Korban Tindak Kekerasan**



SUNARKO, SST., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,
Pengolag Data dan Informasi



FARIDA, S.Sos
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 197306152006042023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya aksesibilitas lingkungan fisik	Jumlah laporan data prasarana umum yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia	Laporan	1
2	Tersedianya data dukung pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberian Bantuan Alat Bantu Aksesibilitas bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	Data dukung Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberian Alat Bantu Aksesibilitas bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	Dokumen	1
3	Tersedianya Laporan Monev Triwulan	Jumlah dokumen Laporan Monev yang disediakan	Dokumen	3
4	Tersedianya Sertifikat Diklat, Kursus, Workshop, Webinar tahun 2026	Jumlah Sertifikat Pengembangan Kompetensi Teknis Tahun 2026	Dokumen	1
5	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Jumlah dokumen PK dan IKI	Dokumen	2
6	Tersedianya laporan mengikuti pelaksanaan Apel Pagi hari Senin	Jumlah dokumentasi mengikuti Apel Pagi hari Senin	Dokumen	4
7	Tersedianya laporan Pelaksanaan GEMA	Jumlah dokumentasi pelaksanaan GEMA	Dokumen	4
8	Tersedianya laporan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan diluar tugas pokok	Jumlah laporan dan dokumentasi pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Laporan	1

9	Tersedianya SK Tim Pengelola Risiko Bidang Rehsos dan PWMNKTk	Jumlah SK Tim Pengelola Risiko	Dokumen	1
10	Tersedianya Laporan Pengelolaan Risiko Bidang Rehsos dan PWMNKTk	Laporan Pengelolaan Risiko Bidang Rehsos dan PWMNKTk 11	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG REHABILITASI
 SOSIAL DAN PENANGANAN WARGA
 NEGARA MIGRAN KORBAN
 TINDAK KEKERASAN**



SUNARKO. SST..M.Si
 Pembina, IV/a
 NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



FARIDA. S.Sos
 Panata Tingkat I, III/d
 NIP. 197306152006042023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MURNIYATI, SE**
Jabatan : **Penelaah Teknis Kebijakan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUNARKO, SST., M.SI**
Jabatan : **Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
dan Penanganan Warga Negara
Migran Korban Tindak Kekerasan,**



SUNARKO, SST., M.Si

Pembina, IV/a

NIP. 19710907 199401 1 002

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan,



MURNIYATI, SE

Penata Tingkat I, III/d

NIP. 19770829 200112 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya sarana umum yang mendukung alat bantu mobilitas	Jumlah laporan data sarana umum yang mendukung alat bantu mobilitas	Laporan	12
2	Terlaksananya penyediaan permakanaan bagi PPKS diluar panti sosial	Data penerima bantuan permakanaan dan laporan aktifitas penyediaan permakanaan bagi PPKS diluar panti sosial	Laporan	24
3	Tersedianya data dukung pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberian Bantuan Permakanan bagi Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan Anak Terlantar	Data dukung Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberian Bantuan Permakanan bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	Bulan	12
4	Tersedianya Sertifikat Diklat, Kursus, Workshop, Webinar tahun 2026	Jumlah Sertifikat Pengembangan Kompetensi Teknis Tahun 2026	Dokumen	4
5	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Jumlah dokumen PK dan IKI	Dokumen	2
6	Tersedianya laporan mengikuti pelaksanaan Apel Pagi hari Senin	Jumlah dokumentasi mengikuti Apel Pagi hari Senin	Dokumen	44
7	Tersedianya laporan Pelaksanaan GEMA	Jumlah dokumentasi pelaksanaan GEMA	Dokumen	44

8	Tersedianya laporan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan diluar tugas pokok	Jumlah laporan dan dokumentasi pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Kegiatan	10
9	Tersedianya SK Tim Pengelola Risiko Bidang Rehsos dan PWMNKTk	Jumlah SK Tim Pengelola Risiko	Dokumen	1
10	Tersedianya Laporan Pengelolaan Risiko Bidang Rehsos dan PWMNKTk	Laporan Pengelolaan Risiko Bidang Rehsos dan PWMNKTk	Kegiatan	12

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
dan Penanganan Warga Negara
Migran Korban Tindak Kekerasan,**



SUNARKO, SST., M.Si

Pembina, IV/a

NIP. 19710907 199401 1 002

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan,



MURNIYATI, SE

Penata Tingkat I, III/d

NIP. 19770829 200112 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AJI .ABDUL MAJID, SE**

Jabatan : **PENGOLLAH DATA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SARAPUL ANAM , SE.,MM**

Jabatan : **KEPALA SUBBAG UMUM,KETELAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

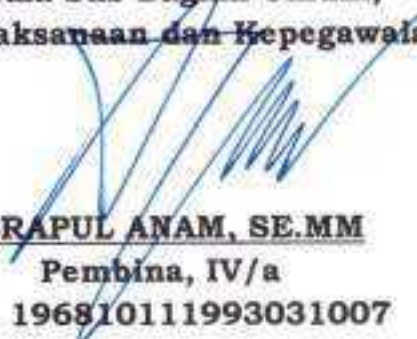
1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawain**


SERAPUL ANAM, SE.MM
Pembina, IV/a
NIP. 196810111993031007

Pihak Pertama,

Pengolah Data


AJI .ABDUL MAJID, SE
Penata Tingkat I / III/d
NIP. 197110012000121004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Jumlah Dokumen	Dokumen	6
2.	Tersedianya Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Pemenuhan Dokumen 1.PK 2.IKI 3.SKP 4.SPT Tahunan	Dokumen	4
3.	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Umtapeg	Jumlah Laporan Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko Umtapeg PerTriwulan	Dokumen	4

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**


SERAPUL ANAM, SE.MM
Pembina, IV/a
NIP. 196810111993031007

Pihak Pertama,
Pengolah Data


AJI .ABDUL MAJID, SE
Penata Tingkat I / III/d
NIP. 197110012000121004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AL MOCHLIS, SE

Jabatan : PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RIADI HADIWINOTO, S. Hut

Jabatan : KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MMAKAM PAHLAWAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan .
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat pada jenis layanan **Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana**.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik pada jenis

layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana.

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PKBPTMP



RIADI HADIWINOTO, S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



AL MOCHLIS, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197104011994011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Penyaluran Bantuan korban bencana	Jumlah Masyarakat Korban Bencana yang mendapat Bantuan	Orang	200
2	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan korban Bencana	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban Bencana	Persen	100
3	Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah Pelayanan yang di berikan	Kegiatan	24
4	Tersedianya dokumen Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen	Dokumen	50
5	Terwujudnya Pengelolaan Data Pemerintah Daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan pada bidang PKBPTMP.	Tingkat Keterisian Data Prioritas Tahunan pada Bidang PKBPTMP	Persen	100
6	Penyadia Data Laporan SPJ Individu	Jumlah Laporan	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PKBPTMP



RIADI HADIWINOTO, S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



AL MOCHLIS, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197104011994011001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SADIANSYAH, SH. I
Jabatan : PENGELOLA DATA DAN INFORMASI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Mencrapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

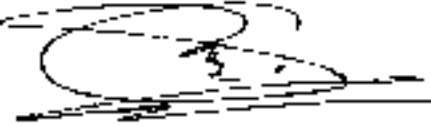
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,
PENGELOLA DATA DAN INFORMASI


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028


SADIANSYAH, SH. I
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19720916 200701 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Menghimpun Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah 20 Kecamatan)	Jumlah Data Dukung	Laporan	20
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Kecamatan Se-Kecamatan Muara Jawa)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Membantu input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026

DINAS SOSIAL

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

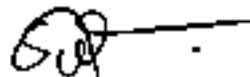
Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

PENGELOLA DATA DAN INFORMASI



LUCY YULIDASARI, M.Psi

Pembina (IV/a)

NIP. 19750717 200801 2 028



SADIANSYAH, SH. I

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19720916 200701 1 016



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SADIANSYAH, SH. I
Jabatan : PENGELOLA DATA DAN INFORMASI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SY GINA FATHILLAH, SE, M.SI
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja; meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL



SY GINA FATHILLAH, SE., M.SI
Pembina (IV/a)
NIP. 19681018 199603 2 004

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026
Pihak Kedua,
PENGELOLA DATA DAN INFORMASI



SADIANSYAH, SH. I
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19720916 200701 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Menghimpun Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah 20 Kecamatan)	Jumlah Data Dukung	Laporan	20
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Kecamatan Se-Kecamatan Muara Jawa)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Kutai Kartanegara, 06 Januari 2026
Pihak Kedua,
PENGELOLA DATA DAN INFORMASI



SY GINA FATHILLAH, SE., M.SI
Pembina (IV/a)
NIP. 19681018 199603 2 004



SADIANSYAH, SH. I
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19720916 200701 1 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KANTI MULATI S.Sos**
Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs.YULIANDRIS SUHERDIMAN**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



Drs YULIANDRIS SUHERDIMAN

Pembina TK.1 IV/b

NIP. 196807081994031013

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



KANTI MULATI S.Sos

Penata Tk 1

NIP 196806061993012002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Terlaksanya Kegiatan Urusan Keuangan dan Perencanaan	30	Dokumen
2.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tersedianya Dokumen PK, IKI dan SKP	3	Dokumen
3.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tersedianya SPT Tahunan	1	Laporan
4.	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau Sekretariat	Jumlah Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Sekretariat dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	24	Laporan

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
SEKERTARIS

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


Drs YULIANDRIS SUHERDIMAN
 Pembina TK 1 IV/b
 NIP. 196807081994031013


KANTI MULATI S.Sos
 Penata Tk 1
 NIP 196806061993012002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASMIDAWATI, SE

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUNARKO, SST., M.SI**

Jabatan : **Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5, Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
dan Penanganan Warga Negara
Migran Korban Tindak Kekerasan**



SUNARKO, SST., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



ASMIDAWATI, SE
Penata III/c
NIP. 197605262007012015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya laporan kejadian kekerasan/bullying terhadap lanjut usia, perempuan, anak dan penyandang disabilitas	Jumlah laporan kejadian bullying terhadap lanjut usia, perempuan, anak dan penyandang disabilitas	Laporan	12
2	Melaksanakan pemberian alat bantu aksesibilitas bagi PPKS diluar panti sosial	Data penerima alat bantu dan laporan aktifitas pemberian alat bantu bagi PPKS diluar panti sosial	Laporan	24
3	Tersedianya Sertifikat Diklat, Kursus, Workshop, Webinar tahun 2026	Jumlah Sertifikat Pengembangan Kompetensi Teknis Tahun 2026	Dokumen	4
4	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Jumlah dokumen PK dan IKI	Dokumen	2
5	Tersedianya laporan mengikuti pelaksanaan Apel Pagi hari Senin	Jumlah dokumentasi mengikuti Apel Pagi hari Senin	Kegiatan	44
6	Tersedianya laporan Pelaksanaan GEMA	Jumlah dokumentasi pelaksanaan GEMA	Kegiatan	44
7	Tersedianya laporan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan diluar tugas pokok	Jumlah laporan dan dokumentasi pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Kegiatan	10

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG REHABILITASI
 SOSIAL DAN PENANGANAN
 WARGA NEGARA MIGRAN
 KORBAN TINDAK KEKERASAN**



SUNARKO, SST.,M.Si
 Pembina, IV/a
 NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



ASMIDAWATI, SE
 Penata III/c
 NIP.197605262007012015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IDA IRJAYATI, A.Md**

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RIADI HADIWINOTO, S.Hut**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan pada bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman makam Pahlawan;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan Masyarakat pada jenis layanan **Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana**;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks

Pelayanan Publik pada jenis layanan **Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana;**

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2025

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Penanganan Korban
Bencana dan Pengelolaan Taman
Makam Pahlawan,**



RIADI HADIWINOTO, S.Hut

Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,

Pengolah Data dan Informasi



IDA IRJAYATI, A.Md

Penata (III/c)
NIP. 198202082006042030

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Penyaluran Bantuan korban bencana	Jumlah Masyarakat Korban Bencana yang mendapat Bantuan	Orang	600
2	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan korban Bencana	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban Bencana	Persen	100
3	Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah Pelayanan yang di berikan	Kegiatan	20
4	Tersedianya dokumen Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen	Dokumen	50
5	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Bidang PKBPTMP	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko Bidang PKBPTMP per Triwulan	Laporan	4
6	Terwujudnya Pengelolaan Data Pemerintah Daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan pada bidang PKBPTMP.	Tingkat Keterisian Data Prioritas Tahunan pada Bidang PKBPTMP	Persen	100
7	Penyadia Data Laporan SPJ Individu	Jumlah Laporan	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2025

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Penanganan Korban
 Bencana dan Pengelolaan Taman
 Makam Pahlawan,**



RIADI HADIWINOTO, S.Hut

Pembina (IV/a)
 NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,

Pengolah Data dan Informasi



IDA IRJAYATI, A.Md

Penata (III/c)
 NIP. 198202082006042030



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HENNY WAHYUNI, S.Sos**

Jabatan : **JP. PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI, ST, MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan

Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KABID. PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FAHRUJI, ST, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 197812082009021001

Pihak Pertama,
**JP. PENELAAH TEKNIS
KEBIJAKAN**



HENNY WAHYUNI, S.Sos
Penata (III/c)
NIP. 198106022000122002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang inklusif kewenangan bidang Linjamsos	Terlaksananya Capaian Indeks Kessos Data BPJS Ketenagakerjaan	Laporan	2
2	Terlaksananya keberdayaan dan kemampuan PPKS dalam menjalankan fungsi sosial kewenangan bidang Linjamsos	Terlaksananya Pengelolaan Data PPKS penerima UEP	Laporan	1
3	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kewenangan bidang Linjamsos	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kewenangan bidang Linjamsos	Dokumen	30
4	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik kewenangan Bidang Linjamsos	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung dalam mendukung pencapaian kinerja Kewenangan Bidang Linjamsos	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KABID. PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**


AHMAD FAHRUDI, ST, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 197812082009021001

Pihak Pertama,
**JP. PENELAAH TEKNIS
KEBIJARAN**


HENNY WAHYUNI, S.Sos
Penata (III/c)
NIP. 198106022000122002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HENNY WAHYUNI, S.Sos**

Jabatan : **JP. PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMAD JAPAR, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Kedua,
**KABID. PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**


MUHAMAD JAPAR, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
**JP. PENELAAH TEKNIS
KEBIJAKAN**


HENNY WAHYUNI, S.Sos

Penata (III/c)
NIP. 198106022000122002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang inklusif kewenangan bidang Linjamsos	Terlaksananya Capaian Indeks Kessos Data BPJS Ketenagakerjaan	Laporan	2
2	Terlaksananya keberdayaan dan kemampuan PPKS dalam menjalankan fungsi sosial kewenangan bidang Linjamsos	Terlaksananya Pengelolaan Data PPKS penerima UEP	Laporan	1
3	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kewenangan bidang Linjamsos	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kewenangan bidang Linjamsos	Dokumen	30
4	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik kewenangan Bidang Linjamsos	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung dalam mendukung pencapaian kinerja Kewenangan Bidang Linjamsos	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Kedua,
**KABID. PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**


MUHAMAD JAPAR, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
**JP. PENELAAH TEKNIS
KEBIJAKAN**


HENNY WAHYUNI, S.Sos
Penata (III/c)
NIP. 198106022000122002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASYADI
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Seleku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

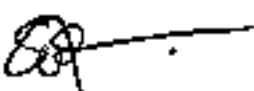
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


LUCY YULDASARI, M.Psi

Pembina (IV/a)

NIP. 19750717 200801 2 028


HASYADI

Penata Muda Tk. 1 (III/b)

NIP. 196909071993011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mencatat, Mengadimistrasikan dan Merekap (list) Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kecamatan Muara Badak, Marang Kayu dan Anggana)	Jumlah Data dukung	Laporan	32
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Muara Badak)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

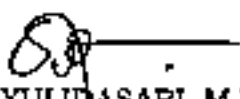
SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 197507172008012028


HASTADI
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 196909071993011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASYADI
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SY. GINA FATHILLAH, SE.,M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SY. GINA FATHILLAH, SE., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 196810181996032004

HASYADI

Penata Muda Tk. I (III/b)

NIP. 196909071993011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mencatat, Mengadimistrasikan dan Merekap (list) Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kecamatan Muara Badak, Marang Kayu dan Anggana)	Jumlah Data dukung	Laporan	32
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Muara Badak)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026
Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


SY. GINA FATHILLAH, SE., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 196810181996032004


HASYADI
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 196909071993011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIF JIWANDONO**
Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM, SE.MM**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;

6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegritas, akurat, muktahir dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, yang dapat diraskan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**


SERAPUL ANAM, SE.MM
Pembina, IV/a
NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,
Pengolah Data dan Informasi


ARIF JIWANDONO
Penata Muda Tk.I, III/b
NIP.197011201993031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Jumlah data dukung penurunan Angka Kriminalitas Tahun 2023 dan Tahun 2024	2	Dokumen
2.	Tersedianya sapras dalam pemenuhan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah sapras dalam pemenuhan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1	Laporan
3.	Tingkat Kepatuhan PK, IKI, SKP dan SPT Tahunan	Jumlah Tingkat Kepatuhan PK, IKI, SKP dan SPT Tahunan	4	Dokumen
4.	Terlaksananya proses administrasi pengelolaan BMD yang Efektif dan Efisien	Jumlah Dokumen Administrasi BMD Per triwulan, Semester dan Tahunan	7	Dokumen
5.	Terlaksananya proses administrasi pengelolaan BMD yang Efektif dan Efisien	Jumlah Usulan RKBMD, RPBMD, Penetapan Status dan Penghapusan BMD	4	Dokumen
6.	Terlaksananya proses administrasi pengelolaan BMD yang Efektif dan Efisien	Jumlah Penyusunan SOP BMD pada OPD Dinas Sosial Kab. Kukar	1	Dokumen
7.	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring Kegiatan, Disiplin Pegawai dan Melaksanakan Perintah Atasan	Jumlah Kegiatan Monitoring, Disiplin Pegawai dan Melaksanakan Perintah Atasan	20	Kegiatan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RACHMAD**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RIADI HADIWINOTO, S. Hut**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang saya pimpin.
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat pada jenis layanan **Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana**.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik pada jenis

layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana.

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PKBPTMP



RIADI HADIWINOTO, S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



RACHMAD
Penata Muda (III/b)
NIP. 196811081992121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Penyaluran Bantuan Korban Bencana	Jumlah Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan	Orang	200
2	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban Bencana	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban Bencana	Persen	100
3	Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah Pelayanan yang diberikan	Kegiatan	24
4	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen	Dokumen	50
5	Penyediaan Data Laporan SPJ Individu	Jumlah Laporan	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PKBPTMP

RIADI HADIWINOTO, S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

RACHMAD
Penata Muda (III/b)
NIP. 196811081992121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HAIRIL AZUAR, S.Sos**
Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

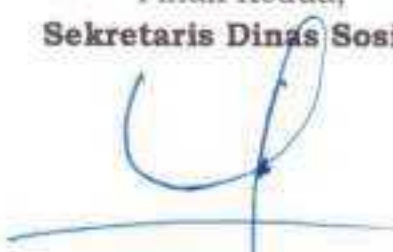
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Sosial,


DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 196807081994031013

Pihak Pertama,
Pengolah Data Dan Informasi,


HAIRIL AZUAR, S.Sos
Penata Muda Tk. 1 (III/b)
NIP. 197804242001121005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksannya peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Laporan	1
2	Terlaksannya peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Tingkat Kepatuhan Penyampaian PK, IKI	Dokumen	2
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP	Dokumen	12
3	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung Administrasi keuangan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban Laporan Keuangan perangkat Daerah	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Laporan	1
4	Terlaksananya Tingkat Kepatuhan dalam Melaksanakan Tugas dari Atasan dan Gerakan Etam Mengaji	Tingkat Kepatuhan dalam Melaksanakan Tugas dari Atasan dan Gerakan Etam Mengaji	Dokumen	24
5	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung Administrasi Keuangan dalam Verifikasi Kelengkapan Dokumen SPM UP, GU dan LS sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Verifikasi Berkas dan Kelengkapan Tagihan SPM UP, GU dan LS Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Keuangan	Dokumen	75
		Verifikasi Berkas dan Kelengkapan Tagihan SPP UP, GU dan LS sebagai Bahan Pertanggungjawaban Keuangan	Dokumen	75
		Verifikasi Dokumen SPJ UP, GU dari Bidang-Bidang Beserta Kelengkapannya sebagai Bahan Pertanggungjawaban Keuangan	Dokumen	100
		Verifikasi Dokumen NPD dari Bidang-	Dokumen	100

		Bidang Sebagai Bahan Pertanggungjawaban		
--	--	--	--	--

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Sosial,



DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 196807081994031013

Pihak Pertama,
Pengolah Data Dan Informasi,



HAIRIL AZUAR, S.Sos

Pertata Muda Tk. 1 (III/b)
NIP. 197804242001121005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASMINAR WATI,S,Sos**
Jabatan : **Penelaah Teknis Kebijakan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUNARKO,SST.,M.SI**
Jabatan : **Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat,
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
dan Penanganan Warga Negara
Migran Korban Tindak Kekerasan**



SUNARKO, SGT., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan



ASMINAR WATI, S.Sos
Penata Muda Tk.I, III/b
NIP. 198111182001122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya informasi kepatuhan sosial (pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dan lanjut usia)	Jumlah data kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	12	Laporan
2	Terlaksananya layanan reunifikasi keluarga bagi PPKS diluar panti sosial	Data penerima layanan reunifikasi dan laporan aktifitas layanan reunifikasi keluarga bagi PPKS diluar panti sosial	24	Laporan
3	Terlaksananya Sosialisasi SOP Bidang Rehabilitasi Sosial dan PWMNKTk	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi SOP	1	Kegiatan
4	Tersedianya Sertifikat Diklat, Kursus, Workshop, Webinar tahun 2026	Jumlah Sertifikat Pengembangan Kompetensi Teknis Tahun 2026	4	Dokumen
5	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Jumlah dokumen PK dan IKI	2	Dokumen
6	Tersedianya laporan mengikuti pelaksanaan Apel Pagi hari Senin	Jumlah dokumentasi mengikuti Apel Pagi hari Senin	44	Kegiatan
7	Tersedianya laporan Pelaksanaan GEMA	Jumlah dokumentasi pelaksanaan GEMA	44	Kegiatan
8	Tersedianya laporan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan diluar tugas pokok	Jumlah laporan dan dokumentasi pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	10	Kegiatan
9	Tersedianya SK Tim Pengelola Risiko Bidang Rehsos dan PWMNKTk	Jumlah SK Tim Pengelola Risiko	1	Dokumen
10	Tersedianya Laporan Pengelolaan Risiko Bidang Rehsos dan PWMNKTk	Laporan Pengelolaan Risiko Bidang Rehsos dan PWMNKTk	12	Kegiatan

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
dan Penanganan Warga Negara
Migran Korban Tindak Kekerasan**



SUNARKO, SST., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan



ASMINAR WATI, S.Sos
Penata Muda Tk.I, III/b
NIP. 198111182001122001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NUR WAHIDATUZZAKIAH, S.PdI**

Jabatan : **PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI, ST, MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FAHRUL ST, MM
Pembina /IV/a
NIP. 19781208 200902 1 001

Pihak Pertama,

Penelaah Teknis Kebijakan



NUR WAHIDATUZZAKIAH, S.PdI
Penata Muda Tk.I/ IIIb
NIP. 19791005 200801 2 032

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Capaian Indeks Kessos Data Stunting	Jumlah Laporan	Dokumen	2
2	Terlaksananya pelayanan publik kewenangan bidang Linjamsos	Jumlah Laporan Pelayanan	Dokumen	12
3	Terlaksana pemenuhan data dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang Linjamsos	Jumlah Dokumen	Dokumen	12
4	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Laporan	Dokumen	20 Dokumen

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL



AHMAD FAHRUDI, ST, MM
Pembina /IV/a
NIP. 19781208 200902 1 001

Pihak Pertama,
PENELAAH TEKNIS
KERIJAKAN



NUR WAHIDATUZZAKIAH, S.Pd
Penata Muda Tk.I/ III b
NIP. 19791005 200801 2 032



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NUR WAHIDATUZZAKIAH, S.PdI**

Jabatan : **PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMAD JAPAR, S.Sos, MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 09 Pebruari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL**


MUHAMAD JAPAR, S.SoS., M.Si
Pembina TK.I /IV/b
NIP. 19690705 198903 1 008

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan


NUR WAHIDATUZZAKIAH, S.PdI
Penata Muda Tk.I/ IIIb
NIP. 19791005 200801 2 032

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Capaian Indeks Kessos Data Stunting	Jumlah Laporan	Dokumen	2
2	Terlaksananya pelayanan publik kewenangan bidang Linjamsos	Jumlah Laporan Pelayanan	Dokumen	12
3	Terlaksana pemenuhan data dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang Linjamsos	Jumlah Dokumen	Dokumen	12
4	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Laporan	Dokumen	20 Dokumen

Kutai Kartanegara, 09 Pebruari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
 JAMINAN SOSIAL**


MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si
 Pembina TK.I/IV/b
 NIP. 19690705 198903 1 008

Pihak Pertama,
**PENELAAH TEKNIS
 KEBIJAKAN**


NUR WAHIDATUZZAKIAH, S.Pdi
 Penata Muda Tk.I/ III b
 NIP. 19791005 200801 2 032



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NOVITASARI, SE**

Jabatan : **PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RIADI HADIWINOTO, S. Hut**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Melaksanakan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang telah ditetapkan pada perangkat daerah sesuai dengan jabatan dan fungsi pihak pertama.
2. Melaksanakan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat pada jenis layanan **Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana.**

3. Melaksanakan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan jabatan dan fungsi pihak pertama.
4. Membuat pelaporan manajemen risiko bidang secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
5. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
6. Melaksanakan penyampaian data capaian pada program kegiatan dan sub kegiatan Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
7. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENANGANAN
KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN
TAMAN MAKAM PAHLAWAN**



RIADI HADIWINOTO, S.Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 19681221003121002

Pihak Pertama,
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



NOVITASARI SE
Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP. 198612152010012029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif Kebencanaan	Data Indeks Risiko Bencana	Dokumen	1
2	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana	Jumlah Masyarakat Korban Bencana yang mendapat bantuan	Orang	200
3	Meningkatkan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban bencana	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban Bencana	Persen	100
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Penanganan Korban bencana dan Pengelolaan TMP	Jumlah Pelayanan kepada masyarakat korban bencana	Kegiatan	24
5	Tersedianya dokumen Perencanaan, Pedoman, Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Bidang Penanganan Korban bencana dan Pengelolaan TMP	Jumlah Dokumen Tingkat Kematangan Organisasi Bidang PKBPTMP	Dokumen	50
6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Bidang Penanganan Korban bencana dan Pengelolaan TMP	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko bidang PKBPTMP per Semester	Dokumen	2

7	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan pada bidang PKBPTMP	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan pada Bidang PKBPTMP	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau Bidang Penanganan Korban bencana dan Pengelolaan TMP	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENANGANAN
 KORBAN BENCANA DAN
 PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
 PAHLAWAN**



RIADI HADIWINOTO, S.Hut
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19681221003121002

Pihak Pertama,
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



NOVITASARL SE
 Penata Muda Tk.I (III/b)
 NIP. 198612152010012029



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIS TEGUH RAHAYU.S.Sos
Jabatan : PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif kewenangan bidang Dayasos	Jumlah Data dukung	Dokumen	1 Dokumen
2	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pelayanan Penerbitan dan Perpanjangan Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelayanan Publik yang terlayani	Dokumen	25 Dokumen
3	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Dokumentasi Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12 Dokumen
4	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengolah Data Aplikasi e-PSKS dan SDI) dan Pengelola Data IPSM	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100%
5	Pengelola Aplikasi dan Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100%

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026
Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA


ARIS TEGUH RAHAYU, S.Sos
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 19790402 201001 1 029



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIS TEGUH RAHAYU.S.Sos
Jabatan : PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SY GINA FATHILLAH,SE.MSI
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif kewenangan bidang Dayasos	Jumlah Data dukung	Dokumen	1 Dokumen
2	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pelayanan Penerbitan dan Perpanjangan Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelayanan Publik yang terlayani	Dokumen	25 Dokumen
3	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Dokumentasi Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12 Dokumen
4	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengolah Data Aplikasi e-PSKS dan SDI) dan Pengelola Data IPSM	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100%
5	Pengelola Aplikasi dan Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100%

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

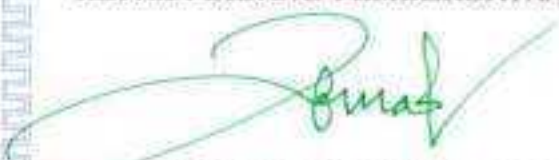
1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

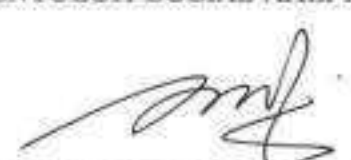
Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA



SY GINA FATHILLAH, SE. MSI
Pembina (IV/a)
NIP. 19681018199603 2 004



ARIS TEGUH RAHAYU, S.Sos
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 19790402 201001 1 029

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL



SY GINA FATHILLAH, SE. MSI
Pembina (IV/a)
NIP. 19681018199603 2 004

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026
Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA



ARIS TEGUH RAHAYU, S.Sos
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 19790402 201001 1 029



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IWAN SETIAWAN**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RIADI HADAWINOTO, S. Hut**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN
BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan;
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKAN) dan;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PKBPTMP

RIADI HADIWINOTO, S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN**

IWAN SETIAWAN
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 197409192001121004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana	Jumlah masyarakat Korban bencana yang mendapat bantuan	Orang	200
2	Meningkatkan Indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban Bencana	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban Bencana	Persen	100
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang PKBTMP	Jumlah Pelayanan yang diberikan	Kegiatan	24
4	Tersedianya dokumen Perencanaan, Pedoman, Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Bidang Penanganan Korban bencana dan Pengelolaan TMP	Jumlah Dokumen Tingkat Kematangan Organisasi Bidang PKBPTMP	Dokumen	50
5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau Bidang Penanganan Korban bencana dan Pengelolaan TMP	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Laporan	12

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PKBPTMP



Ruadi Hadiwinoto, S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN**



IWAN SETIAWAN
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 197409192001121004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ISNO SUSILO**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI, ST, MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL**


AHMAD FAHRUDI, ST, MM
Pembina IV/a
NIP. 19781208200921001

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN**


ISNO SUSILO
Penata Muda Tingkat I III/b
NIP. 197403052001121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya peningkatan Kesejahteraan Sosial yang inklusif kewenangan bidang Linjamsos	Terlaksana Capaian Pengelolaan Data Veteran dan Janda Veteran	Laporan	4
2	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik kewenangan Bidang Linjamsos	Terpenuhinya Laporan 1. IKI 2. PK 3. SPT Tahunan 4. IKM Penerima Santunan Veteran dan Janda Veteran 5. GEMA 6. APEL	Dokumen	3
3	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik kewenangan Bidang Linjamsos	Indikator Kepuasan Masyarakat Penerima Santunan Veteran dan Janda Veteran	Laporan	1

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
 JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FAHRUJI, ST, MM
 Pembina IV/a
 NIP. 19781208200921001

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
 PERKANTORAN**



ISNO SUSILO
 Penata Muda Tingkat I III/b
 NIP. 197403052001121002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISNO SUSILO

Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUHAMAD JAPAR, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan

kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Pebruari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL**



MUHAMAD JAPAR, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN**



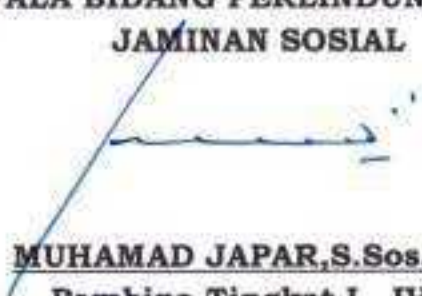
ISNO SUSILO
Penata Muda Tingkat I III/b
NIP. 197403052001121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya peningkatan Kesejahteraan Sosial yang inklusif kewenangan bidang Linjamsos	Terlaksana Capaian Pengelolaan Data Veteran dan Janda Veteran	Laporan	4
2	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik kewenangan Bidang Linjamsos	Terpenuhinya Laporan 1. IKI 2. PK 3. SPT Tahunan 4. IKM Penerima Santunan Veteran dan Janda Veteran 5. GEMA 6. APEL	Dokumen	3
3	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik kewenangan Bidang Linjamsos	Indikator Kepuasan Masyarakat Penerima Santunan Veteran dan Janda Veteran	Laporan	1

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
 JAMINAN SOSIAL**


MUHAMAD JAPAR, S.Sos, M.Si
 Pembina Tingkat I IV/b
 NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
 PERKANTORAN**


ISNO SUSILO
 Penata Muda Tingkat I III/b
 NIP. 197403052001121002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AKHMAD RIANSYAH**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUNARKO,SST.,M.SI**
Jabatan : **Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5, Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
dan Penanganan Warga Negara
Migran Korban Tindak Kekerasan**



SUNARKO, SST., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,
(PENGADMINISTRASI PERKANTORAN)



AKHMAD RIANSYAH
Penata Muda Tingkat I/III/b
NIP. 197412042001121005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Menyediakan data Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial diluar Panti Sosial	Jumlah data rehabilitasi sosial diluar panti sosial bagi Lanjut Usia Terlantar yang disediakan	Data Laporan Dokumen	12
2	Mengikuti Diklat, Kursus, Workshop, Webinar pengembangan kompetensi teknis tahun 2026	Jumlah Sertifikat Pengembangan Kompetensi Teknis Tahun 2026	Dokumen	4
3	Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Jumlah dokumen PK dan IKI	Dokumen	2
4	Mengikuti pelaksanaan apel pagi hari Senin	Jumlah dokumentasi mengikuti Apel Pagi hari Senin	Kegiatan	44
5	Melaksanakan Gemma	Jumlah dokumentasi pelaksanaan GEMA	Kegiatan	44
6	Terlaksananya fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PPKS diluar panti sosial	Data penerima fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, dan laporan aktifitas pemberian fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PPKS diluar Panti sosial	Laporan	24
7	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan diluar tugas pokok	Jumlah laporan dan dokumentasi pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Kegiatan	10
8	Terlaksananya pengisian data "Satu Data Indonesia" secara berkala	Melaksanakan input data pada aplikasi "Satu Data Indonesia" setiap bulan	Dokumen	12

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG REHABILITASI
SOSIAL DAN PENANGANAN
WARGA NEGARA MIGRAN
KORBAN TINDAK KEKERASAN**



SUNARKO, SST., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



AKHMAD RIANSYAH
Penata Muda Tingkat I/III/b
NIP. 197412042001121005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MATHEUS, S.Sos**

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI, ST.,MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL**


AHMAD FAHRUL, ST.,MM

Pembina (IV/a)
NIP. 197812082009021001

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


MATHEUS, S.Sos

Penata Muda (III/a)
NIP. 197606052006041024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Melaksanakan Pengelolaan Data melalui aplikasi SIKS-NG	Rekap DTSEN melalui Aplikasi SIKS-NG	Orang	291742
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Linjamsos	Laporan Pelayanan Publik Bidang Linjamsos	Laporan	12
3	Meningkatnya Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah data SPM yang terdata pada DTSEN	Orang	500
4	Pemenuhan Data Dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik kewenangan Bidang Linjamsos	Laporan Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI), SPT Tahunan, Tugas Kedinasan Lain dari Atasan	Laporan	12
5	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan kewenangan bidang Linjamsos	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
 JAMINAN SOSIAL**


AHMAD FAHRUDI, ST., MM
 Pembina (IV/a)
 NIP. 197812082009021001

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


MATHEUS, S.Sos
 Penata Muda (III/a)
 NIP. 197606052006041024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MATHEUS, S.Sos**

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL**

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196907051989031008

MATHEUS, S.Sos
Penata Muda (III/a)
NIP. 197606052006041024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Melaksanakan Pengelolaan Data melalui aplikasi SIKS-NG	Rekap DTSEN melalui Aplikasi SIKS-NG	Orang	280776
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Linjamsos	Laporan Pelayanan Publik Bidang Linjamsos	Dokumen	12
3	Meningkatnya Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah SPM yang terdata pada DTSEN	Orang	500
4	Pemenuhan Data Dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik kewenangan Bidang Linjamsos	Laporan Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI), Tugas Kedinasan Lain dari Atasan	Dokumen	12
5	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan kewenangan bidang Linjamsos	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
 JAMINAN SOSIAL**

MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

MATHEUS, S.Sos
 Penata Muda (III/a)
 NIP. 197606052006041024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERLINA, S.Sos**

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INDRAMSI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD AHRUJI, ST.,MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL**

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


AHMAD AHRUJI, ST.,MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197812082009021001


HERLINA, S.Sos
PENATA MUDA (III/a)
NIP. 197210082006042017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksana Pengelolaan Data Rekomendasi BPJS PBPB PB PEMDA	Terlaksananya pengelolaan data Rekomendasi BPJS/PBI dan BP Pemda	Laporan	12
2	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kewenangan bidang Linjamsos	Terlaksananya layanan pembuatan BPJS BP PEMDA dan BPJS/PBI	Laporan	12
3	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik kewenangan Bidang Linjamsos	IKI, PK, SPT TAHUNAN, IKM, Tugas Kedinasan Lain dari Atasan, Surat Menyurat, Apel Setiap hari Senin, GEMA	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
 JAMINAN SOSIAL**

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


AHMAD FAHRULI, ST.,MM
 PEMBINA (IV/a)
 NIP. 197812082009021001


HERLINA, S.Sos
 PENATA MUDA (III/a)
 NIP. 197210082006042017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERLINA, S.Sos**
Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORAMSI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMAD JAPAR, S.Sos.,M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
5. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

6. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
7. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

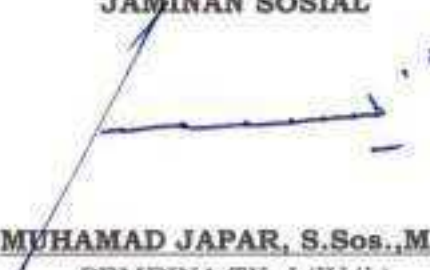
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL**


MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

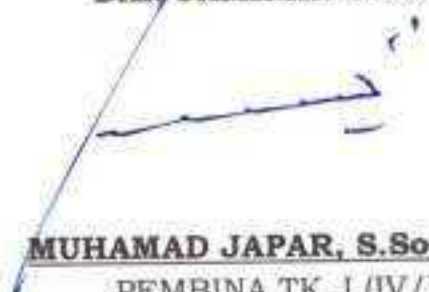

HERLINA, S.Sos
PENATA MUDA (III/a)
NIP. 197210082006042017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksana Pengelolaan Data Rekomendasi BPJS PBPB PB PEMDA	Terlaksananya pengelolaan data Rekomendasi BPJS/PBI dan BP Pemda	Laporan	12
2	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kewenangan bidang Linjamsos	Terlaksananya layanan pembuatan BPJS BP PEMDA dan BPJS/PBI	Laporan	12
3	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik kewenangan Bidang Linjamsos	IKI, PK, IKM, Tugas Kedinasan Lain dari Atasan, Surat Menyurat.	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
 DAN JAMINAN SOSIAL**


MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si
 PEMBINA TK. I (IV/b)
 NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


HERLINA, S.Sos
 PENATA MUDA (III/a)
 NIP. 197210082006042017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hapipah. S. Ag
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Riadi Hadiwinoto, S.Hut
Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Melaksanakan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
2. Melaksanakan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat pada jenis layanan **Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana.**
3. Melaksanakan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Melaksanakan Penerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervise melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau mengundurkan diri dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Pertama

Kepala Bidang Kepala Bidang Penanganan
Korban Bencana dan Pengelolaan Taman
Makam Pahlawan,

Riadi Hadiwinoto, S.Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Kedua,

Pengelola Data dan Informasi,

Hapipah, S. Ag
Penata Muda
NIP. 197609082007012019

TUGAS SEBAGAI PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

NO	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana	Jumlah masyarakat Korban bencana yang mendapat bantuan	Orang	200
2	Meningkatkan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban bencana	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban Bencana	Persen	100%
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang PKBPTMP	Jumlah Pelayanan yang diberikan	Kegiatan	24
4	Tersedianya dokumen Perencanaan, Pedoman, Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Bidang PKBPTMP	Jumlah Dokumen	Dokumen	50
5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau Bidang PKBPTMP	Jumlah Laporan	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Pertama

Kepala Bidang Kepala Bidang Penanganan
Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam
Pahlawan,

Riadi Hadiwinoto. S.Hut

Pembina (IV/a)

NIP. 196812212003121002

Pihak Kedua,

Pengelola Data dan Informasi,

Hapipah. S. Ag

Penata Muda

NIP. 197609082007012019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GHAUSUL ARIFIN**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI,ST,MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FAHRUL, ST, MM
Pembina / IV/a
NIP. 19781208200921001

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN**



GHAUSUL ARIFIN
Pengatur Tingkat I II/d
NIP. 197601042001121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya capaian Data Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk	Jumlah Laporan	Laporan	1
2	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik kewenangan Bidang Linjamsos	Terpenuhinya Laporan 1. IKI 2. PK 3. SPT Tahunan	Dokumen	3

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
 JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FAHRUL, ST, MM
 Pembina / IV/a
 NIP. 19781208200921001

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
 PERKANTORAN**



GHAUSUL ARIFIN
 Pengatur Tingkat I II/d
 NIP. 197601042001121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GHAUSUL ARIFIN**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL**



MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN**



GHAUSUL ARIFIN
Pengatur Tingkat I / II/d
NIP. 197601042001121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya capaian Data Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk	Jumlah Laporan	Laporan	1
2	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik kewenangan Bidang Linjamsos	Terpenuhinya Laporan 1. IKI 2. PK 3. SPT Tahunan	Dokumen	3

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL**


MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN**


GHAUSUL ARIFIN
Pengatur Tingkat I / II/d
NIP. 197601042001121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HAIRIL ANWAR**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUNARKO, SST.,M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN
PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK
KEKERASAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,

**Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dan
Penanganan Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan**



SUNARKO, SST., M.Si

Pembina IV/a

NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,

Pengadministrasi Perkantoran



HAIRIL ANWAR

Pengatur Tingkat I / II/d

NIP. 197511242007011012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya informasi Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Penyandang disabilitas terlantar, gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sosial	Jumlah data rehabilitasi sosial diluar panti sosial bagi Gelandangan/ Pengemis yang disediakan	Kegiatan	12
2	Terlaksananya pemberian layanan kedaruratan bagi PPKS diluar panti sosial	Data penerima layanan kedaruratan dan laporan aktifitas pelayanan kedaruratan bagi PPKS diluar panti sosial	Laporan	24
3	Tersedianya Sertifikat Diklat, Kursus, Workshop, Webinar tahun 2026	Jumlah Sertifikat Pengembangan Kompetensi Teknis Tahun 2026	Dokumen	4
4	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Jumlah dokumen PK dan IKI	Dokumen	2
5	Tersedianya laporan mengikuti pelaksanaan Apel Pagi hari Senin	Jumlah dokumentasi mengikuti Apel Pagi hari Senin	Kegiatan	44
6	Tersedianya laporan Pelaksanaan GEMA	Jumlah dokumentasi pelaksanaan GEMA	Kegiatan	44
7	Tersedianya laporan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan diluar tugas pokok	Jumlah laporan dan dokumentasi pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Kegiatan	10

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,

**Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dan
Penanganan Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan**



SUNARKO, SST., M.Si

Pembina IV/a

NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,

Pengadministrasi Perkantoran



HAIRIL ANWAR

Pengatur Tingkat I / II/d

NIP. 197511242007011012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALFIANNUR**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM, SE.MM**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**


SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina, IV/a
NIP. 196810111993031007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


ALFLANNUR

Pengatur Tk.I, IId
NIP. 198110252007011007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Jumlah data dukung Indeks Ketahanan Pangan, Ketercukupan Gizi dan Air minum layak	4	Dokumen
2.	Tingkat Kepatuhan PK, IKI, SKP dan SPT Tahunan	Jumlah Tingkat Kepatuhan PK, IKI, SKP dan SPT Tahunan	4	Dokumen
3.	Terlaksananya proses administrasi pengelolaan BMD yang Efektif dan Efisien	Jumlah Dokumen Administrasi BMD Per triwulan, Semester dan Tahunan	7	Dokumen
4.	Terlaksananya proses administrasi pengelolaan BMD yang Efektif dan Efisien	Jumlah Usulan RKBMD, RPBMD, Penetapan Status dan Penghapusan BMD	4	Dokumen
5.	Terlaksananya proses administrasi pengelolaan BMD yang Efektif dan Efisien	Jumlah Penyusunan SOP BMD pada OPD Dinas Sosial Kab. Kukar	1	Dokumen
6.	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring Kegiatan, Disiplin Pegawai dan Melaksanakan Perintah Atasan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), Monitoring, Disiplin Pegawai dan Melaksanakan Perintah Atasan	10	Kegiatan
7.	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	1	Kegiatan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAHYUDI**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RIADI HADAWINOTO, S. Hut**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN
BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
TAMAN PAHLAWAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan;
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKAN) dan;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PKB-TMP

RIADI HADIWINOTO, S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN**

WAHYUDI
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 19810428200701006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana	Jumlah masyarakat Korban bencana yang mendapat bantuan	Orang	200
2	Meningkatkan Indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban Bencana	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban Bencana	Persen	100
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang PKBTMP	Jumlah Pelayanan yang diberikan	Kegiatan	24
4	Tersedianya dokumen Perencanaan, Pedoman, Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Bidang Penanganan Korban bencana dan Pengelolaan TMP	Jumlah Dokumen Tingkat Kematangan Organisasi Bidang PKBTMP	Dokumen	50
5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau Bidang Penanganan Korban bencana dan Pengelolaan TMP	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Laporan	12

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PKB-TMP



Ruadi Hadiwinoto, S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN



WAHYUDI
Pengatur Tingkat 1 (II/d)
NIP. 19810428200701006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DINAS SOSIAL

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HABIBI HIDAYAT**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat; Melaksanakan Disiplin Pegawai, Gema dan Melaksanakan Perintah Atasan
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,


DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 196807081994031013

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


HABIBI HIDAYAT
Pengatur Tk. 1 (II/d)
NIP. 198110012006041019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Dokumen PK, IKI, SKP	Dokumen	3
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Laporan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025	Laporan	1
3	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah laporan pembukuan mutasi keuangan sehingga tercatat secara lengkap, dan akurat;	Berkas	200
4	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Laporan SPJ Bendahara	Laporan	12
5	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Berkas Surat Perintah Pembayaran (SPP)UP/GU/Gaji dan Tunjangan ASN/LS yang dibuat	Dokumen	25
6	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah daftar gaji dan tunjangan pegawai yang dikeluarkan dan dibuat	Dokumen	38

7	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Administrasi Surat Menyurat pada Bagian Keuangan melalui Srikandi dan Non Srikandi	Dokumen	5
8	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah laporan pajak yang dipungut dari transaksi yang kena pajak	Laporan	12
9	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Jumlah Monitoring, Evaluasi, Disiplin Pegawai, Gema dan Melaksanakan Perintah Atasan	Kegiatan	20

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,

DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 196807081994031013

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

HABIBI HIDAYAT
Pengatur Tk. 1 (II/d)
NIP. 198110012006041019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IFVAN FADILLAH**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMAD JAPAR, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL**



MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN**



IFVAN FADILLAH
Pengatur Tingkat I / II/d
NIP. 197908262008011012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksana Administrasi Penerima Santunan Etam Sejahtera	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
2	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik kewenangan Bidang Linjamsos	Terpenuhinya Laporan 1. IKI 2. PK 3. SPT Tahunan 4. IKM - Penerima Santunan Etam Sejahtera	Dokumen	3

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL**


MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN**


IFVAN FADILLAH
Pengatur Tingkat I / II/d
NIP. 197908262008011012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IFVAN FADILLAH**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI,ST,MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FAHRUJI, ST, MM
Pembina / IV/a
NIP. 19781208200921001

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN**



IFVAN FADILLAH
Pengatur Tingkat I / II/d
NIP. 197908262008011012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksana Administrasi Penerima Santunan Etam Sejahtera	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
2	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik kewenangan Bidang Linjamsos	Terpenuhinya Laporan 1. IKI 2. PK 3. SPT Tahunan 4. IKM - Penerima Santunan Etam Sejahtera	Dokumen	3

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL**


AHMAD FAHRUDI, ST, MM
Pembina / IV/a
NIP. 19781208200921001

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN**


IFVAN FADILLAH
Pengatur Tingkat I / II/d
NIP. 197908262008011012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EMI MARIATI**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM, SE.MM**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**



SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina, IV/a
NIP. 196810111993031007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran



EMI MARIATI

Pengatur Tk.1, IId
NIP. 197805092009012003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Pemenuhan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Jumlah data dukung Penyandang Disabilitas yang menempati jabatan strategis di lembaga eksekutif	2	Dokumen
2.	Terlaksananya data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Tingkat Kepatuhan PK, IKI, SKP dan SPT Tahunan	4	Dokumen
3.	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Proses Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Cuti dan DUK Aparatur Sipil Negara (ASN).	Jumlah dokumen Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Cuti dan DUK Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terproses	32	Dokumen
4.	Terlaksananya Proses update dan verifikasi data ASN pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian SIMPEG Dan SiASN	Proses update dan verifikasi data ASN pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian SIMPEG Dan SiASN	2	Aplikasi
5.	Terlaksananya data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Administrasi Surat Menyurat pada Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian melalui Aplikasi Srikandi dan Non Srikandi	20	Surat
6.	Terlaksananya data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Penataan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	Kegiatan
7.	Terlaksananya data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah tersusunnya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan data pengembangan kompetensi SDM secara sistematis	2	Dokumen

8.	Terlaksananya data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Data dukung akuntabel pelaksanaan kegiatan (SPJ), Monitoring, Evaluasi, Disiplin Pegawai, Gema dan Melaksanakan Perintah Atasan	20	Kegiatan
----	--	--	----	----------

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**


SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina, IV/a
NIP. 196810111993031007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


EMI MARIATI

Pengatur Tk.1, IId
NIP. 197805092009012003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUS YADIANSYAH**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **KUN DWI ROHMANI,S.Sos**

Jabatan : **KEPALA UPTD PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK DINAS
SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan;
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKAN) dan;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

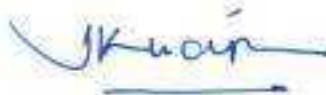
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA UPTD PELAYANAN SOSIAL
ASUHAN ANAK DINAS SOSIAL**



KUN DWI ROHMANI, S.Sos
Pembina Tingkat I III/d
NIP. 196802271994022002

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN**



AGUS YADIANSYAH
Pengatur Tingkat I II/d
NIP. 197708022009021002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya administrasi pelayanan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam menjalankan fungsi sosial pada UPTD Odah Ngasoh Kanak	Jumlah pelayanan bimbingan fisik mental, sosial dan spritual	kegiatan	12
2.	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Publik UPTD Odah Ngasoh Kanak	Jumlah Kegiatan Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Publik UPTD Odah Ngasoh Kanak	kegiatan	12
3.	Terlaksananya administrasi Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Pengadministrasi Data Dokumen pendukung Tingkat Kematangan Organisasi UPTD Odah Ngasoh Kanak	Dokumen	5

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD PELAYANAN SOSIAL
ASUHAN ANAK DINAS SOSIAL



KUN DWI ROHMANI,S.Sos
Pembina Tingkat I III/d
NIP. 196802271994022002

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN



AGUS YADIANSYAH
Pengatur Tingkat I II/d
NIP. 197708022009021002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASDIAN NOOR

Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


LUCY YULIDASARI, M.Psi

Pembina (IV/a)

NIP. 19750717 200801 2 028


ASDIAN NOOR

NIP. 19690816 200902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Menghimpun dan Mengelola Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kecamatan Zona Hulu)	Jumlah Data Dukung	Laporan	7
2.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3.	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Kecamatan Se-Kecamatan Tenggarong Seberang)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4.	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	.	.	.
2	.	.	.
3	.	.	.
JUMLAH ANGGARAN		.	.

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (V/a)
NIP. 19750717 200801 2 028


ASDIAN NOOR
NIP. 19690816 200902 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASDIAN NOOR
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SY GINA FATHILLAH, SE, M.SI
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SY GINA FATHILLAH, SE., M.SI
Pembina (IV/a)
NIP. 19681018 199603 2 004

ASDIAN NOOR
NIP. 19690816 200902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Menghimpun dan Mengelola Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kecamatan Zona Hulu)	Jumlah Data Dukung	Laporan	7
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Kecamatan Se-Kecamatan Tenggarong Seberang)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026
Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



SY GINA FATHILLAH, SE., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19681018 199603 2 004



ASDIAN NOOR
NIP. 19690816 200902 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARJANI**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUNARKO,SST.,M.SI**
Jabatan : **Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
dan Penanganan Warga Negara
Migran Korban Tindak Kekerasan**



SUNARKO, SST., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN**



MARJANI
Pengatur Tk I II/d
NIP. 198211122010011015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya pemberian pelayanan penelusuran keluarga bagi PPKS diluar panti sosial	Data pemberian pelayanan penelusuran keluarga per bulan bagi PPKS diluar panti sosial	laporan	24
2	Tersedianya dokumen Laporan Reviu SCP	Jumlah laporan reviu SOP	Dokumen	3
3	Tersedianya Sertifikat Diklat, Kursus, Workshop, Webinar tahun 2026	Jumlah Sertifikat Pengembangan Kompetensi Teknis Tahun 2026	Dokumen	4
4	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Jumlah dokumen PK dan IKI	Dokumen	2
5	Tersedianya laporan mengkuti pelaksanaan Apel Pagi hari Senin	Jumlah dokumentasi mengikuti Apel Pagi hari Senin	Kegiatan	44
6	Tersedianya laporan Pelaksanaan GEMA	Jumlah dokumentasi pelaksanaan GEMA	Dokumen	44
7	Tersedianya laporan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan diluar tugas pokok	Jumlah laporan dan dokumentasi pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Kegiatan	10
8	Terlaksananya pengisian tabel Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) secara berkala	Melaksanakan pengisian tabel data LPPD setiap bulan	Kegiatan	12

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG REHABILITASI
 SOSIAL DAN PENANGANAN WARGA
 NEGARA MIGRAN KORBAN
 TINDAK KEKERASAN**


SUNARKO, SST., M.Si
 Pembina, IV/a
 NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
 PERKANTORAN**


MARJANI
 Pengatur Tk I II/d
 NIP. 198211122010011015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PRASETYO K**

Jabatan : **Pengadministrasi Perkantoran**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUNARKO, SST.M.Si**

Jabatan : **Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan
Penanganan Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan**



SUNARKO, SST.M.Si

Pembina/IV/a
NIP. 1971090719940110002

Pihak Pertama,
**Pengadministrasi
Perkantoran**



PRASETYO K

Pengatur Tingkat I/II/d
NIP. 1975042320080110017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi PPKS diluar panti sosial	Data penerima bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial per bulan bagi PPKS diluar panti sosial	Laporan	12
2	Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Jumlah dokumen PK dan IKI	Dokumen	2
3	Mengikuti pelaksanaan apel pagi hari Senin	Jumlah dokumentasi mengikuti Apel Pagi hari Senin	Kegiatan	44
4	Melaksanakan Gemma	Jumlah dokumentasi pelaksanaan GEMA	Kegiatan	44
5	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan diluar tugas pokok	Jumlah laporan dan dokumentasi pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Kegiatan	10
6	Tersedianya informasi kebijakan (Perda) tentang Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	Jumlah Perda tentang Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	Laporan	2
7	Mengikuti Diklat, Kursus, Workshop, Webinar pengembangan kompetensi teknis tahun 2026	Jumlah Sertifikat Pengembangan Kompetensi Teknis Tahun 2026	Dokumen	4

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan
Penanganan Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN


SUNARKO, SST.M.Si

Pembina/IV/a
NIP. 1971090719940110002


PRASETYO K

Pengatur Tingkat I/II/d
NIP. 1975042320080110017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. MAWARDI**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUNARKO, SST., M.SI**
Jabatan : **Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
dan Penanganan Warga Negara
Migran Korban Tindak Kekerasan**


SUNARKO, SST., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


M. MAWARDI
Pengatur Tk. I II/d
NIP. 197909082009021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**DINAS SOSIAL****KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya data Anak Telantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial	Jumlah data rehabilitasi sosial bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial	Kegiatan	12
2	Terlaksananya layanan data dan pengaduan bagi PPKS di luar Panti Sosial	Data penerima layanan data dan pengaduan bagi PPKS di luar Panti Sosial	Laporan	24
3	Tersedianya laporan Penerapan SPM Dinas Sosial	Data realisasi penerapan SPM Triwulan dan laporan aktifitas input data realisasi penerapan SPM	Laporan	24
4	Tersedianya Sertifikat Diklat, Kursus, Workshop, Webinar tahun 2026	Jumlah Sertifikat Pengembangan Kompetensi Teknis Tahun 2026	Dokumen	1
5	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Jumlah dokumen PK dan IKI	Dokumen	2
6	Tersedianya laporan mengikuti pelaksanaan Apel Pagi hari Senin	Jumlah dokumentasi mengikuti Apel Pagi hari Senin	Kegiatan	44
7	Tersedianya laporan Pelaksanaan GEMA	Jumlah dokumentasi pelaksanaan GEMA	Dokumen	44
8	Tersedianya laporan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan di luar tugas pokok	Jumlah laporan dan dokumentasi pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Kegiatan	10

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG REHABILITASI
SOSIAL DAN PENANGANAN WARGA
NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK
KEKERASAN**

**SUNARKO, Bst, M.Si**

Pembina, IV/a

NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN,

**M. MAWARDI**

Pengatur Tk.II/d

NIP. 197909082009021001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERU SUKMONO**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM, SE., MM**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;

6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**


SERAPUL ANAM, SE., MM

Pembina, IV/a
NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


HERU SUKMONO

Pengatur Tk.I, II/d
NIP. 198009182010011017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Jumlah data dukung Indeks Ketahanan Pangan, Ketercukupan Gizi dan Air minum layak	4	Dokumen
2.	Tersedianya Saprass Pendukung Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah saprass dalam pemenuhan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1	Laporan
3.	Tingkat Kepatuhan PK, IKI, SKP dan SPT Tahunan	Jumlah Tingkat Kepatuhan PK, IKI, SKP dan SPT Tahunan	4	Dokumen
4.	Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen
5.	Tersedianya sarana pengaduan dan pelayanan cepat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) dan Pengelolaan PPID	Jumlah pengaduan dan pelayanan cepat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) dan Pengelolaan PPID	2	Aplikasi
6.	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring Kegiatan, Disiplin Pegawai dan Melaksanakan Perintah Atasan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Monitoring, Disiplin Pegawai dan Melaksanakan Perintah Atasan	10	Kegiatan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HAIRIF**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI, ST, MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL**


AHMAD FAHRUJI, ST, MM
Pembina IV/a
NIP. 19781208200921001

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN**


HAIRIF
Pengatur Tingkat I II/D
NIP. 197711052010011014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya peningkatan Kesejahteraan Sosial yang inklusif kewenangan bidang Linjamsos	Terlaksana Capaian Data Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	Laporan	1
2	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik kewenangan Bidang Linjamsos	Terpenuhinya Laporan 1. IKI 2. PK 3. SPT Tahunan 4. IKM Penerima Santunan Veteran dan Janda Veteran 5. GEMA 6. APEL	Dokumen	3

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FAHRUJI, ST, MM
Pembina IV/a
NIP. 19781208200921001

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN**



HAIRIF
Pengatur Tingkat I II/D
NIP. 197711052010011014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAIRIF

Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUHAMAD JAPAR, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Pebruari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL**


MUHAMAD JAPAR, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN**

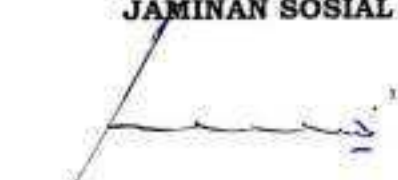

HAIRIF
Pengatur Tingkat I II/D
NIP. 197711052010011014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya peningkatan Kesejahteraan Sosial yang inklusif kewenangan bidang Linjamsos	Terlaksana Capaian Data Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	Laporan	1
2	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik kewenangan Bidang Linjamsos	Terpenuhinya Laporan 1. IKI 2. PK 3. SPT Tahunan 4. IKM Penerima Santunan Veteran dan Janda Veteran 5. GEMA 6. APEL	Dokumen	3

Kutai Kartanegara, 9 Pebruari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
 JAMINAN SOSIAL**


MUHAMAD JAPAR, S.Sos, M.Si
 Pembina Tingkat I IV/b
 NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
 PERKANTORAN**


HAIRIF
 Pengatur Tingkat I II/D
 NIP. 197711052010011014



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKHMAD BAIHAKI
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas *pelayanan* publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



LUCY YULIDASARI, M.Psi

Pembina (IV/a)

NIP. 19750717 200801 2 028



AKHMAD BAIHAKI

Pengatur Tk I (II/d)

NIP. 19820907 201001 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Menghimpun dan Mengelola Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kecamatan Zona Tengah)	Jumlah Data dukung	Laporan	6
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Pelayanan Publik yang terlayani	Dokumen	12
3	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Bidang Dayasos	Jumlah Dokumen Tingkat Kematangan Organisasi Bidang Dayasos	Dokumen	4
4	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Sangasanga dan Kenohan)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
5	Pengelola Aplikasi dan Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026
Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


AKHMAD BAIHAKI
Pengatur Tk I (II/d)
NIP. 19820907 201001 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKHMAD BAIHAKI
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SY GINA FATHILLAH, SE, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas *pelayanan* publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

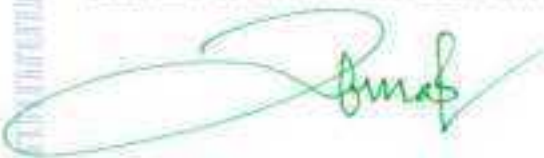
Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026

Pihak Kedua,

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



SY GINA FATHILLAH, SE, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19681018199603 2 004



AKHMAD BAIHAKI

Pengatur Tk I (II/d)

NIP. 19820907 201001 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Menghimpun dan Mengelola Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kecamatan Zona Tengah)	Jumlah Data dukung	Laporan	6
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Pelayanan Publik yang terlayani	Dokumen	12
3	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Bidang Dayasos	Jumlah Dokumen Tingkat Kematangan Organisasi Bidang Dayasos	Dokumen	4
4	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Sangasanga dan Kenohan)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
5	Pengelola Aplikasi dan Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL



SY GINA FATHILLAH, SE, M.Si
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19681018199603 2 004

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026
 Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



AKHMAD BAIHAKI
 Pengatur Tk I (II/d)
 NIP. 19820907 201001 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SULASTRI**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM, SE.MM**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**

SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina, IV/a
NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran

SULASTRI

Pengatur TK. I
NIP. 197811152012122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Jumlah data dukung laporan PPKS dan total jabatan strategis di lembaga eksekutif	2	Dokumen
2.	Terlaksananya data dukungan organisasi perangkat daerah yang efektif akuntabel dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik	Tingkat kepatuhan dokumen PK. IKI, SKP dan SPT Tahunan	4	Dokumen
3.	Terlaksananya Administrasi Kenaikan Pegawai Negeri Sipil, Pensiun ASN dan Korpri Pegawai	Jumlah Dokumen Administrasi Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil	12	Dokumen
4.	Terlaksananya dokumen Administrasi Kepegawaiaan Rekapitulasi, ASN, Kehadiran, ASN dan TPP PNS	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaiaan Rekapitulasi dan Kehadiran ASN dan TPP PNS	24	dokumen
5.	Terlaksananya Jumlah Administrasi Surat Menyurat Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)	Jumlah Administrasi Surat Menyurat pada Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian melalui Aplikasi Srikandi dan Non Srikandi	50	surat
6.	Terlaksananya penyusunan Anjab ABK dan Peta Jabatan	Jumlah Anjab ABK dan Peta Jabatan	2	dokumen
7.	Terlaksananya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan data pengembangan kompetensi SDM secara sistematis	Jumlah tersusunnya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan data pengembangan kompetensi SDM secara sistematis	2	Dokumen
8.	Terlaksananya Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Monitoring, Evaluasi, Disiplin Pegawai, Gema dan Melaksanakan Perintah Atasan	20	Kegiatan

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**

SERAPUL ANAM, SE.MM
Pembina, IV/a
NIP. 196810111994031007

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026
Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran

SULASTRI
Pengatur TK. I
NIP. 197811152012122001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HASANUDDIN**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
Sekretaris



DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 196807081994031013

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran



HASANUDDIN

Pengatur Tk. 1 (II/d)
NIP. 198507302012121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersediannya Data Dukung Administrasi keuangan pembuatan Daftar Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pemenuhan data dukung administrasi keuangan pembuatan daftar gaji dan tunjangan ASN	Dokumen	38
2	Tersediannya Data Rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya data rekonsiliasi gaji dan tunjangan ASN	Laporan	2
3	Tersediannya Dokumen PK, IKI, SKP	Jumlah Dokumen PK, IKI, SKP	Dokumen	3
4	Melaksanakan Pengimputan KGB.SK Naik Pangkat.SK Pensiun ke Aplikasi Simgaji	Melaksanakan Pengimputan KGB.SK naik pangkat,SK pensiun ke Aplikasi Simgaji	Laporan	20
5	Membuat SKPP ASN	Membuat SKPP ASN	Laporan	6
6	Terlaksananya Monitoring,Evaluasi,Disiplin Pegawai,Gema dan Melaksanakan Perintah Atasan	Jumlah Monitoring,Evaluasi,Disiplin Pegawai,Gema dan Melaksanakan Perintah Atasan	Laporan	20
7	Menyampaikan SPT Tahunan	Jumlah SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2026	Laporan	1

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,


DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 196807081994031013

Pihak Pertama,
PERENCANA MUDA


HASANUDDIN
Pengatur Tk. 1 (II/d)
NIP. 198507302012121002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MASTIYAH**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI, ST.MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara,

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
& JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FARRUJI, ST, MM

Pembina (IV/a)
NIP. 197812082009021001

Pihak Pertama,
ADMINISTRASI PERKANTORAN



MASTIYAH

Pengatur Muda TK 1 (II/b)
NIP. 198411102012122002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Administrasi DTSEN	Terlaksana Capaian Data Pengesahan Bulanan DTSEN	Laporan	12
2	Terlaksananya Laporan Data Penerima Program PKH	Terpenuhinya Data Penerima Program PKH	Laporan	4
3	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik kewenangan Bidang Linjamsos	Terpenuhinya Laporan 1. IKI 2. PK 3. SPT Tahunan 4. Melaksanakan Perintah Atasan 5. GEMA 6. APEL	Laporan	12

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
 JAMINAN SOSIAL**


AHMAD FAHRUJI, ST.MM
 Pembina (IV/a)
 NIP. 197812082009021001

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
 PERKANTORAN**


MASTIYAH
 Pengatur Muda Tingkat I II/b
 NIP. 198411102012122002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MASTIYAH**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

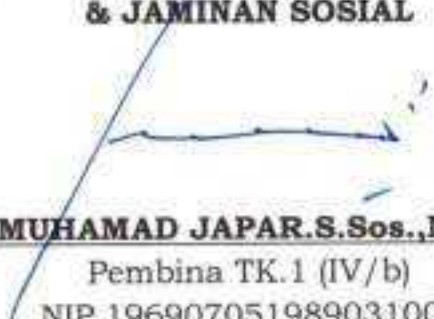
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Pebruari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
& JAMINAN SOSIAL**



MUHAMAD JAPAR.S.Sos.,M.Si

Pembina TK.1 (IV/b)
NIP.196907051989031008

Pihak Pertama,
ADMINISTRASI PERKANTORAN



MASTIYAH

Pengatur Muda TK 1 (II/b)
NIP. 198411102012122002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Administrasi DTSEN	Terlaksana Laporan Pengesahan DTSEN	Laporan	12
2	Terlaksananya Laporan Data Penerima Program PKH	Terpenuhinya Data Penerima Program PKH	Laporan	4
3	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang Efektif, Akuntabel, dan Adaptif dalam mendukung capaian Kinerja serta peningkatan Kualitas pelayanan Publik kewenangan Bidang Linjamsos	Terpenuhinya Laporan PK, IKI, Gema, Nilai-nilai Budaya Kerja Organisasi	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 9 Pebruari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
& JAMINAN SOSIAL**


MUHAMAD JAPAR.S.Sos.,M.Si
Pembina TK.1 (IV/b)
NIP.196907051989031008

Pihak Pertama,
ADMINISTRASI PERKANTORAN


MASTIYAH
Pengatur Muda TK 1 (II/b)
NIP. 198411102012122002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMAMAD WAHYUDI**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RIADI HADIWINOTO, S. Hut**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap penyaluran bantuan korban bencana pada bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
2. Mewujudkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penanganan korban bencana pada jenis layanan **Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana**.
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Bidang PKBPTMP.
4. Melaksanakan pemenuhan tersedianya dokumen pelaksanaan untuk penyelenggaraan pelayanan publik Bidang PKBPTMP.
5. Melaksanakan pemenuhan tersedianya data laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) individu.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PKBPTMP

RIADI HADIWINOTO. S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

MUHAMMAD WAHYUDI
Juru Tingkat I (I/d)
NIP. 198009222009021004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap penyaluran bantuan korban bencana	Jumlah Masyarakat Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	Orang	200
2	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban Bencana	Indeks Presensi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban Bencana	Persen	100
3	Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Pelayanan kepada masyarakat korban bencana	Kegiatan	24
4	Ketersediaan dokumen pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Tingkat Kematangan Organisasi Bidang PKBPTMP	Dokumen	50
5	Pemenuhan penyediaan data Laporan SPJ individu	Jumlah Laporan SPJ individu	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PKBPTMP



RIADI HADIWINOTO, S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



MUHAMMAD WAHYUDI
Juru Tingkat I (I/d)
NIP. 198009222009021004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARINA NAPILYA.S,Sos**
Jabatan : **PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM, SE.MM**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**


SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina, IV/a
NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional


MARINA NAPILYA. S.Sos

Kelas IX
NI PPPK. 198812012025212027

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Pemenuhan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Jumlah data dukung kemiskinan	1	Dokumen
2.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Tingkat Kepatuhan PK, IKI, SKP dan SPT Tahunan	4	Dokumen
3.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Administrasi Surat Menyurat pada Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian melalui Aplikasi Srikandi non Srikandi	10	Surat
4.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Data dukung akuntabel kegiatan Pelaksanaan surat pertanggung jawaban (SPJ) Sub Kegiatan	10	Dokumen
5.	Tersusunnya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan data pengembangan kompetensi SDM secara sistematis	Jumlah tersusunnya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan data pengembangan Kompetensi SDM secara sistematis	1	Dokumen
6.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Disiplin Pegawai, Gema dan Melaksanakan Perintah Atasan	20	Kegiatan
7.	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau Sekretariat	Jumlah Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	1	Kegiatan

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional


SERAPUL ANAM, SE.MM
 Pembina, IV/a
 NIP. 196810111994031007


MARINA NAPILYA, S.Sos
 Kelas IX
 NIP PPPK. 198812012025212027



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD YULIANSYAH, S.E**
Jabatan : **PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM, SE.MM**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

4. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

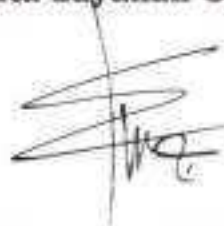
Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**

SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina IV/a
NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional



AHMAD YULIANSYAH, S.E

Kelas IX
NI PPPK. 197807272025211014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Jumlah Data Dukung Data Partisipasi Ekonomi Gini Rasio	1	Dokumen
2.	Terpenuhinya Saprass Dalam Pemenuhan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah Saprass dalam pemenuhan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1	Laporan
3.	Tingkat Kepatuhan PK, IKI, SKP dan SPT Tahunan	Jumlah Tingkat Kepatuhan PK, IKI, SKP dan SPT Tahunan	4	Dokumen
4.	Terlaksannaya Penilaian Kemantangan Organisasi Pada Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	5	Kegiatan
5.	Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Pelaksanaan Perintah Atasan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rapat –Rapat, Apel ASN, Gerakan Etam Mengaji (GEMA) dan Melaksanakan Perintah Atasan	25	Kegiatan
6.	Terlaksananya Tingkat Kepatuhan Infut e-Pantau Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Tingkat Ketepatan waktu Input e-Pantau Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dan Telah di Verifikasi 100% Per Tanggal 10 Setiap Bulan	1	Kegiatan

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	50.000.000.00	
JUMLAH ANGGARAN		50.000.000,00	

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**


SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina, IV/a
NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional


AHMAD YULIANSYAH, S.E

Kelas IX
NI PPPK. 197807272025211014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRY LESMANA, SE
Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026
Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL


ANDRY LESMANA, SE
Penata (IX)
NIPPPK. 19830506 202521 1 022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mengelola Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kec. Sangasanga, Samboja dan Muara Jawa)	Jumlah Data dukung	Laporan	25
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Koordinasi Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Samboja)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026
Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL


ANDRY-LESMANA, SE
Penata (IX)
NIPPPK. 19830506 202521 1 022



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRY LESMANA, SE
Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SY.GINA FATHILLAH,SE. M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,

PENATA LAYANAN OPERASIONAL


SY.GINA FATHILLAH, SE, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19681018 199603 2 004


ANDRY LESMANA, SE

Penata (IX)

NIPPPK. 19830506 202521 1 022

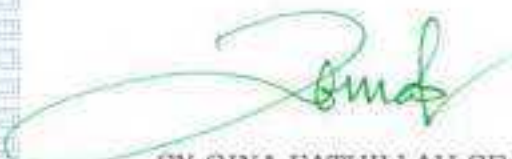
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mengelola Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kec. Sangasanga, Samboja dan Muara Jawa)	Jumlah Data dukung	Laporan	25
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Koordinasi Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Samboja)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan.	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


SY.GINA FATHILLAH, SE. M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19681018 199603 2 004

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026
Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL


ANDRY LESMANA, SE
Penata (IX)
NIPPPK. 19830506 202521 1 022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ZAID, SE
Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi

Pembina (IV/a)

NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL


MUHAMMAD ZAID, SE

NIP. 198709162025211027

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mengelola Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kec. Muara Muntai dan Muara Wis)	Jumlah Data dukung	Laporan	20
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik bidang Dayasos	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Bidang Dayasos	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko Bidang Dayasos PerTriwulan	Dokumen	4
4	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna SeKecamatan Muara Muntai)	Tingkat keterisian Data Bidang Dayasos Prioritas Tahunan	Persen	100
5	Pemenuhan Data Dukung Dokumen dan Penatausahaan (eviden) Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026
Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL


MUHAMMAD ZAID, SE
NIP. 198709162025211027



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ZAID, SE
Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SY GINA FATHILLAH, SE, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Kutai Kartanegara, 9 februari 2026
Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL



SY GINA FATHILLAH, SE, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 196810181996032004



MUHAMMAD ZAID, SE

NIP. 198709162025211027

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mengelola Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kec. Muara Muntai dan Muara Wis)	Jumlah Data dukung	Laporan	20
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik bidang Dayasos	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Bidang Dayasos	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko Bidang Dayasos PerTriwulan	Dokumen	4
4	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna SeKecamatan Muara Muntai)	Tingkat keterisian Data Bidang Dayasos Prioritas Tahunan	Persen	100
5	Pemenuhan Data Dukung Dokumen dan Penatausahaan (eviden) Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL



SY GINA FATHILLAH, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 196810181996032004

Kutai Kartanegara, 9 februari 2026
Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL



MUHAMMAD ZAID, SE
NIP. 198709162025211027



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIF, S.Sos
Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026
Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL


ARIF, S.Sos
Ahli Pertama (IX)
NIPPPK. 198507202025211025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mengelola Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kec. Tabang, Kembang Janggut dan Kota Bangun Darat)	Jumlah Data dukung	Laporan	40
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Koordinasi Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Anggana)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Pemenuhan Data Dukung Dokumen dan Penatausahaan (eviden) Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026
Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL


ARIF, S.Sos
Ahli Pertama (IX)
NIPPPK. 198507202025211025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIF, S.Sos
Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SY GINA FATHILLAH, SE, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL



SY GINA FATAHILLAH, SE.M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 196810181996032004



ARIF, S.Sos

Ahli Pertama (IX)

NIPPPK. 198507202025211025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mengelola Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kec. Tabang, Kembang Janggut dan Kota Bangun Darat)	Jumlah Data dukung	Laporan	40
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Koordinasi Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Anggana)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Pemenuhan Data Dukung Dokumen dan Penatausahaan (eviden) Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


SY GINA FATAHILLAH, SE.M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 196810181996032004

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026
Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL


ARIF, S.Sos
Ahli Pertama (IX)
NIPPPK. 198507202025211025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BRIGITTE OKTORIA, S.SOS
Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

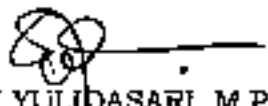
Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026
Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028


BRIGITTE OKTORIA, S.SOS
NIPPPK. 19721018 202521 2 007

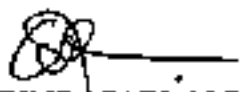
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mengelola Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kec. Sebulu dan Tenggarong)	Jumlah Data Dukung	Laporan	28
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Tenggarong)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026
Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


BRIGITTE OKTORIA, S.SOS
NIPPPK. 19721018 202521 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BRIGITTE OKTORIA, S.SOS
Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SY GINA FATHILLAH, SE, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA



SY GINA FATHILLAH, SE, M.Si

Pembina (IV/a)
NIP. 19681018199603 2 004



BRIGITTE OKTORIA, S.SOS

NIPPPK. 19721018 202521 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mengelola Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kec. Sebulu dan Tenggarong)	Jumlah Data Dukung	Laporan	28
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Tenggarong)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL



SY GINA FATHILLAH, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19681018199603 2 004

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026
Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



BRIGITTE OKTORIA, S.SOS
NIPPPK. 19721018 202521 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDDY IRAWAN, S.Sos
Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026
Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL


EDDY IRAWAN, S.Sos
Penata (III/a)
NIPPPK. 198111122025211014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mengelola Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kec. Loa Kulu, Loa Janan dan Samboja Barat)	Jumlah Data dukung	Laporan	34
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Marang Kayu) dan LK3	Tingkat keterisian Data Bidang Dayasos Prioritas Tahunan	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026
Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL


EDDY IRAWAN, S.Sos
Penata (III/a)
NIPPPK. 198111122025211014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDDY IRAWAN, S.Sos
Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SY GINA FATHILLAH, SE, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

SY GINA FATHILLAH, SE, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19681018199603 2 004

Pihak Kedua,

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

EDDY IRAWAN, S.Sos

NIPPPK. 198111122025211014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mengelola Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kec. Loa Kulu, Loa Janan dan Samboja Barat)	Jumlah Data dukung	Laporan	34
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Marang Kayu) dan LK3	Tingkat keterisian Data Bidang Dayasos Prioritas Tahunan	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL



SY GINA FATHILLAH, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19681018199603 2 004

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026

Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL



EDDY IRAWAN, S.Sos
NIPPPK. 198111122025211014



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IKE KUSNITA, S.Sos
Jabatan : PENATA LAYANAN OPRASIONAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717/2008 2 028

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026
Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL


IKE KUSNITA, S.Sos
Penata (III/a)
NIPPPK. 198503212025212025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mengelola Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Muara Kaman dan Tenggarong Seberang)	Jumlah Data dukung	Laporan	38
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Muara Kaman)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 2008 2 028

Kutai Kartanegara, 05 JANUARI 2026

Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL


IKE KUSNITA, S.Sos
Ahli Pertama (IX)
NIPPPK. 198503212025212025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IKE KUSNITA, S.Sos
Jabatan : PENATA LAYANAN OPRASIONAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SY GINA FATHILLAH, SE, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

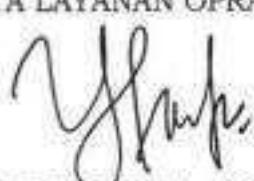
Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL



SY GINA FATAHILLAH, SE.M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 196810181996032004



IKE KUSNITA, S.Sos

Penata (III/a)

NIPPPK. 198503212025212025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mengelola Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Muara Kaman dan Tenggarong Seberang)	Jumlah Data dukung	Laporan	38
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Muara Kaman)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL



SY GINA FATAHILLAH, SE.M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 196810181996032004

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026

Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPRASIONAL



IKE KUSNITA, S.Sos
Ahli Pertama (IX)

NIPPPK. 198503212025212025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FACHRUDDIN, SE
Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL


LUCY YULHASARI M.Psi
Pemilina (V/A)
NIP. 19750717200801 2 028


FACHRUDDIN SE
NI PPPK. 19860525 202521 1 067

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mengelola Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kec. Muara Badak, Marang Kayu dan Anggana)	Jumlah Data dukung	Laporan	32
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan public	Jumlah Data dukung	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Muara Wis)	Jumlah Data dukung	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Input	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Pertama.
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL


LUCY YULIDASARI M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717200801 2 028


FACHRUDDIN, SE
NI PPPK. 19860525 202521 1 067



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FACHRUDDIN, SE
Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SY GINA FATHILLAH, SE, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL



SY GINA FATHILLAH, SE, M.Si

Pembina (IV/a)
NIP. 19681018 199603 2 004



FACHRUDDIN, SE

NI PPPK. 19860525 202521 1 067

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mengelola Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kec. Muara Badak, Marang Kayu dan Anggana)	Jumlah Data dukung	Laporan	32
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan public	Jumlah Data dukung	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Muara Wis)	Jumlah Data dukung	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Input	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL



SY GINA FATHILLAH, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19681018 199603 2 004

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026
Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL



FACHRUDDIN, SE
NI PPPK 19860525 202521 1 067



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERLINA SUSANTI, SE
Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Seleku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan keajahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

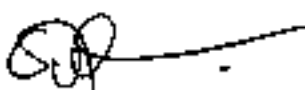
1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 197507172008012028


HERLINA SUSANTI, SE
NIPPPK. 197803192023212011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mengelola Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kec. Kenohan dan Kota Bangun)	Jumlah Data dukung	Laporan	20
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Kembang Janggut)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026
Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL


HERLINA SUSANTI, SE
NIPPPK. 19780319 202521 2 011



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERLINA SUSANTI, SE
Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SY GINA FATHILLAH, SE, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

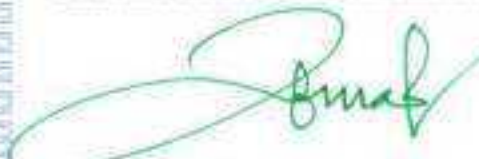
Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,

PENATA LAYANAN OPERASIONAL



SY GINA FATHILLAH, SE, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19681018199603 2 004



HERLINA SUSANTI, SE

NIPPPK. 19780319 202521 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mengelola Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kec. Kenohan dan Kota Bangun)	Jumlah Data dukung	Laporan	20
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Kembang Janggut)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL



SY GINA FATHILLAH, SE. M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19681018199603 2 004

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026
Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL



HERLINA SUSANTI, SE
NIPPPK. 19780319 202521 2 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABDUR RAHMAN ,S.Sos**
Jabatan : **PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMAD JAPAR, S.Sos.,M.S**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL**



MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
**PENATA LAYANAN
OPERASIONAL**



ABDUR RAHMAN, S.Sos
Kelas IX
NI PPPK. 198602072025211016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksana Pembuatan Rekomendasi BPJS PBPB PB PEMDA	Jumlah Dokumen	Dokumen	300
2.	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kewenangan bidang Linjamsos	Jumlah Laporan	Laporan	12
3.	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang Efektif, Akuntabel, dan Adaptif dalam mendukung capaian Kinerja serta peningkatan Kualitas pelayanan Publik kewenangan Bidang Linjamsos	2. IKI 3. SPT Tahunan 4. PK 5. IKM - Bpjs Kesehatan	Laporan	12

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
 JAMINAN SOSIAL**


MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si
 Pembina Tingkat I / IV/b
 NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
**PENATA LAYANAN
 OPERASIONAL**


ABDUR RAHMAN, S.Sos
 Kelas IX
 NI PPPK. 198602072025211016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABDUR RAHMAN ,S.Sos**

Jabatan : **PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI,ST,MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FAHRUL, ST, MM
Pembina / IV/a
NIP. 19781208200921001

Pihak Pertama,
**PENATA LAYANAN
OPERASIONAL**



ABDUR RAHMAN, S.Sos
Kelas IX
NI PPPK. 198602072025211016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksana Pembuatan Rekomendasi BPJS PBPB PB PEMDA	Jumlah Dokumen	Dokumen	300
2.	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kewenangan bidang Linjamsos	Jumlah Laporan	Laporan	12
3.	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang Efektif, Akuntabel, dan Adaptif dalam mendukung capaian Kinerja serta peningkatan Kualitas pelayanan Publik kewenangan Bidang Linjamsos	2. IKI 3. SPT Tahunan 4. PK 5. IKM - Bpjs Kesehatan	Laporan	12

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FAHRUJIL,ST,MM
Pembina / IV/a
NIP. 19781208200921001

Pihak Pertama,
**PENATA LAYANAN
OPERASIONAL**



ABDUR RAHMAN ,S.Sos
Kelas IX
NI PPPK. 198602072025211016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUSNIAR, S.Sos**

Jabatan : **PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI, ST, MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan
8. mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FAHRUJI, ST, MM
Pembina IV/a
NIP. 19781208200921001

Pihak Pertama,
**PENATA LAYANAN
OPERASIONAL**



YUSNIAR, S.Sos
Kelas IX
NIPPPK. 198010032025212012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik	Terlaksana Pelayanan Publik melalui Pembuatan Suket maupun Pengecekan Desi DTSEN	Laporan	12
2	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik kewenangan Bidang Linjamsos	Terpenuhinya Laporan 1. IKI 2. PK 3. SPT Tahunan 4. Adminstrasi Surat Menyurat Bidang Linjamsos 5. GEMA 6. APEL	Laporan	12
3	Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.	Terlaksananya Pengisian E- Pantau	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FAHRUDI, ST, MM
Pembina IV/a
NIP. 19781208200921001

Pihak Pertama,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL



YUSNIAR, S.Sos
Kelas IX
NIPPPK. 19801003 202521 2 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUSNIAR, S.Sos**

Jabatan : **PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMAD JAPAR, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan
8. mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

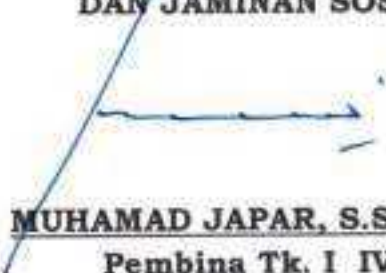
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 09 Febuari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**



MUHAMAD JAPAR, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I IV/b
NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
**PENATA LAYANAN
OPERASIONAL**



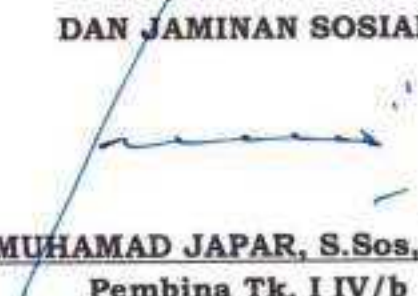
YUSNIAR, S.Sos
Kelas IX
NIPPPK. 198010032025212012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik	Terlaksana Pelayanan Publik melalui Pembuatan Suket maupun Pengecekan Desi DTSEN	Laporan	12
2	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik kewenangan Bidang Linjamsos	Terpenuhinya Laporan 1. IKI 2. PK 3. Adminsitasi Surat Menyurat Bidang Linjamsos 4. GEMA 5. Nilai- Nilai budaya kerja Organisasi 6. Tugas Lain yang diperintah Atasan	Laporan	12
3	Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.	Terlaksananya Pengisian E- Pantau	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**



MUHAMAD JAPAR, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I IV/b
NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL



YUSNIAR, S.Sos
Kelas IX
NIPPPK. 19801003 202521 2 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YULI KARINA NAINGGOLAN, SE**
Jabatan : **PENATA LAYANANA OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI, ST.,MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan public;
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**


AHMAD FARRUZ, ST., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 197812082009021001

Pihak Pertama,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL


YULI KARINA NAINGGOLAN, SE
Kelas IX
NIPPPK. 198707022025212020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya peningkatan Kesejahteraan Sosial yang inklusif kewenangan bidang Linjamsos	Jumlah Penduduk yang terdaftar pada DTSEN Desil 1 s/d 5	Orang	291742
2	Terlaksananya keberdayaan dan kemampuan PPKS dalam menjalankan fungsi sosial kewenangan bidang Linjamsos	Terpenuhinya Pengelolaan Data PPKS oleh OPD terkait	Laporan	4
3	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kewenangan bidang Linjamsos	Terlaksananya aduan masyarakat tentang DTSEN	Dokumen	50
4	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kewenangan bidang Linjamsos	Surat Keterangan DTSEN	Dokumen	100
5	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik kewenangan Bidang Linjamsos	Terpenuhinya IKI, PK, SPT Tahunan, Gema, Apel, Surat Menyurat Bidang Linjamsos, Tugas kedinasan yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan	Laporan	12

6	Terlaksana Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan kewenangan bidang Linjamsos	Terinputnya Data Penyelenggara Satu Data Indonesia	Persen	100
---	---	--	--------	-----

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
 DAN JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FAHRUL, ST, MM
 Pembina (IV/a)
 NIP. 197812082009021001

Pihak Pertama,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL



YULI KARINA NAINGGOLAN, SE
 Kelas IX
 NIPPPK. 198707022025212020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YULI KARINA NAINGGOLAN, SE**
Jabatan : **PENATA LAYANANA OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan public;
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

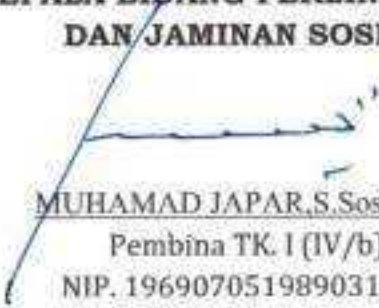
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**


MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL


YULI KARINA NAINGGOLAN, SE

Kelas IX

NIPPPK. 198707022025212020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya peningkatan Kesejahteraan Sosial yang inklusif kewenangan bidang Linjamsos	Jumlah Penduduk yang terdaftar pada DTSEN Desil 1 s/d 5	Orang	280776
2	Terlaksananya keberdayaan dan kemampuan PPKS dalam menjalankan fungsi sosial kewenangan bidang Linjamsos	Terpenuhinya Pengelolaan Data PPKS oleh OPD terkait	Laporan	4
3	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kewenangan bidang Linjamsos	Terlaksananya aduan masyarakat tentang DTSEN	Dokumen	50
4	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kewenangan bidang Linjamsos	Surat Keterangan DTSEN	Dokumen	100
5	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik kewenangan Bidang Linjamsos	Terpenuhinya IKI, PK, Gema, Nilai-nilai Budaya Kerja Organisasi, Surat Menyurat Bidang Linjamsos, Tugas kedinasan yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan	Laporan	12

6	Terlaksana Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan kewenangan bidang Linjamsos	Terinputnya Data Penyelenggara Satu Data Indonesia	Persen	100
---	---	--	--------	-----

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
 DAN JAMINAN SOSIAL**


MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si
 Pembina TK. I (IV/b)
 NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL


YULIKARINA NAINGGOLAN, SE
 Kelas IX
 NIPPPK. 198707022025212020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PUTRI INTAN PURSALINA, S.Sos**
Jabatan : **PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI, ST, MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FAHRUJI, ST, MM
Pembina IV/a
NIP. 19781208200921001

Pihak Pertama,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL



PUTRI INTAN PURSALINA, S.Sos
Kelas IX
NI PPPK. 199407232024212033

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya peningkatan Kesejahteraan Sosial yang inklusif kewenangan bidang Linjamsos	Terlaksananya Capaian Indeks Kessos Data BPJS Ketenagakerjaan	Laporan	4
2	Terlaksananya keberdayaan dan kemampuan PPKS dalam menjalankan fungsi sosial kewenangan bidang Linjamsos	Terlaksananya Pengelolaan Data Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Data	12
3	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kewenangan bidang Linjamsos	Terlaksananya Kegiatan Survey kepuasan Masyarakat (IKM) Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional PBPU PB Pemda Kab Kutai Kartanegara dan Terlaksananya Layanan Aduan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Kegiatan	2
4	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik kewenangan Bidang Linjamsos Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kewenangan bidang Linjamsos	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Dokumen	12

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FAHRUJI, ST, MM
Pembina IV/a
NIP. 19781208200921001

Pihak Pertama,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL



PUTRI INTAN PURSALINA, S.Sos
Kelas IX
NI PPPK. 199407232024212033



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PUTRI INTAN PURSALINA, S.Sos**

Jabatan : **PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMAD JAPAR, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

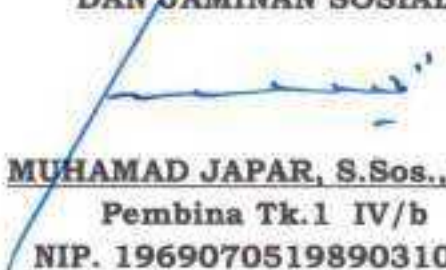
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**



MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si
Pembina Tk.1 IV/b
NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL



PUTRI INTAN PURSALINA, S.Sos
Kelas IX
NIP. 199407232025212033

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya peningkatan Kesejahteraan Sosial yang inklusif kewenangan bidang Linjamsos	Terlaksananya Capaian Indeks Kessos Data BPJS Ketenagakerjaan	Laporan	4
2	Terlaksananya keberdayaan dan kemampuan PPKS dalam menjalankan fungsi sosial kewenangan bidang Linjamsos	Terlaksananya Pengelolaan Data Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Data	12
3	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kewenangan bidang Linjamsos	Terlaksananya Kegiatan Survey kepuasan Masyarakat (IKM) Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional PBPU PB Pemda Kab Kutai Kartanegara dan Terlaksananya Layanan Aduan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Kegiatan	2
4	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik kewenangan Bidang Linjamsos Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kewenangan bidang Linjamsos	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Dokumen	12

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**



MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si

Pembina Tk.1 IV/b

NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,

PENATA LAYANAN OPERASIONAL



PUTRI INTAN PURSALINA, S.Sos

Kelas IX

NIP. 199407232025212033



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABD. GAFAR KOMAINI, S.Sos**

Jabatan : **Penata Layanan Operasional**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUNARKO, SST., M.SI**

Jabatan : **Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan
Penanganan Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan**



SUNARKO, SST., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional



ABD. GAFAR KOMAINI, S.Sos

Kelas IX
NIP. 198103032025211026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya dokumen Standar Pelayanan Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah dokumen Standar Pelayanan	Dokumen	1
2	Tersedianya Sertifikat Diklat, Kursus, Workshop, Webinar tahun 2026	Jumlah dokumen data dukung	Dokumen	4
3	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Jumlah dokumen PK dan IKI	Dokumen	2
4	Tersedianya laporan mengikuti pelaksanaan Apel Pagi hari Senin	Jumlah dokumentasi mengikuti Apel Pagi hari Senin	Kegiatan	44
5	Tersedianya laporan Pelaksanaan GEMA	Jumlah dokumentasi pelaksanaan GEMA	Kegiatan	44
6	Tersedianya laporan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan diluar tugas pokok	Jumlah laporan dan dokumentasi pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Laporan	10
7	Tersedianya data sasaran hasil validasi DTSEN di Kecamatan Wilayah Pantai	Data sasaran bersumber DTSEN di Kecamatan Wilayah Pantai yang telah divalidasi	Laporan	12
8	Terlaksananya pengisian formulir Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) secara berkala	Melaksanakan pengisian formulir DSSD setiap bulan	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL
 DAN PENANGANAN WARGA NEGARA
 MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**



SUNARKO, SST., M.Si
 Pembina, IV/a
 NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional



ABD. GAFAR KOMAINI, S.Sos
 Kelas IX
 NIP. 198103032025211026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IMELDA BR GINTING, SE**
Jabatan : **Penata Layanan Operasional**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUNARKO,SST.,M.SI**
Jabatan : **Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
dan Penanganan Warga Negara
Migran Korban Tindak Kekerasan**



SUNARKO, SST., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional



IMELDA BR GINTING, SE
Kelas IX
NIP. 19820217 202521 2 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Menyediakan data Penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial diluar Panti Sosial.	Jumlah data rehabilitasi sosial diluar panti sosial Penyandang Disabilitas Terlantar yang disediakan	Kegiatan	12
2	Melaksanakan layanan rujukan bagi PPKS diluar panti sosial	Data pemberian layanan rujukan per bulan dan laporan aktifitas pelayanan rujukan bagi PPKS diluar panti sosial	Laporan	24
3	Menyediakan data dukung Tingkat Kematangan Organisasi Bidang Rehabilitasi Sosial meliputi : Dokumen RKA/DPA, Laporan Realisasi Anggaran dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sub Kegiatan.	Jumlah Dokumen RKA/DPA Sub Kegiatan, Realisasi Anggaran dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sub Kegiatan	Dokumen	20
4	Mengikuti Diklat, Kursus, Workshop, Webinar pengembangan kompetensi teknis tahun 2026	Jumlah Sertifikat Pengembangan Kompetensi Teknis Tahun 2026	Dokumen	4
5	Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Jumlah dokumen PK dan IKI	Dokumen	2
6	Mengikuti pelaksanaan apel pagi hari Senin	Jumlah dokumentasi mengikuti Apel Pagi hari Senin	Kegiatan	44
7	Melaksanakan GEMA	Jumlah dokumentasi pelaksanaan GEMA	Kegiatan	44

8	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan diluar tugas pokok	Jumlah laporan an dokumentasi pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Kegiatan	30
9	Melaksanakan input e-pantau 4 sub kegiatan tepat waktu	Jumlah sub kegiatan yang diinput di e-pantau setiap bulan	Dokumen	48

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG REHABILITASI
 SOSIAL DAN PENANGANAN WARGA
 NEGARA MIGRAN KORBAN
 TINDAK KEKERASAN**



SUNARKO, SST., M.Si
 Pembina, IV/a
 NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional



IMELDA BR GINTING, SE
 Kelas IX
 NIP. 19820217 202521 2 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RINA SRI WAHYUNI.S.Sos**
Jabatan : **PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUNARKO,SST.,M.SI**
Jabatan : **Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
dan Penanganan Warga Negara
Migran Korban Tindak Kekerasan**



SUNARKO, SST., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional



RINA SRI WAHYUNI.S.Sos

Kelas IX

NIP. 198402182025212014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya data dukung pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Data dukung pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Laporan	12
2	Tersedianya dokumen Laporan Survey Kepuasan Masyarakat per semester	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan	2
3	Tersedianya Sertifikat Diklat, Kursus, Workshop, Webinar tahun 2026	Jumlah Sertifikat Pengembangan Kompetensi Teknis Tahun 2026	Dokumen	4
4	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Jumlah dokumen PK dan IKI	Dokumen	2
5	Tersedianya laporan mengikuti pelaksanaan Apel Pagi hari Senin	Jumlah dokumentasi mengikuti Apel Pagi hari Senin	Kegiatan	44
6	Tersedianya laporan Pelaksanaan GEMA	Jumlah dokumentasi pelaksanaan GEMA	Kegiatan	44
7	Tersedianya laporan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan diluar tugas pokok	Jumlah laporan dan dokumentasi pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Kegiatan	10
8	Tersedianya data sasaran hasil validasi DTSEN di Kecamatan Wilayah Tengah	Data sasaran bersumber DTSEN di Kecamatan Wilayah Tengah yang telah divalidasi	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Pertama,

PENATA LAYANAN OPERASIONAL



RINA SRI WAHYUNI.S.Sos

Kelas IX

NIP. 198402182025212014

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG REHABILITASI
SOSIAL DAN PENANGANAN WARGA
NEGARA MIGRAN KORBAN
TINDAK KEKERASAN**



SUNARKO, SST.,M.Si

Pembina, IV/a

NIP. 197109071994011002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FADILLAH, S. Sos**
Jabatan : **Penata Layanan Operasional**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUNARKO, SST., M.SI**
Jabatan : **Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
dan Penanganan Warga Negara
Migran Korban Tindak Kekerasan**



SUNARKO, SST., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional



FADILLAH, S.Sos
Kelas IX
NIP. 19770711 202521 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya data dukung penyusunan Laporan Forum Konsultasi Publik	Menyediakan data dukung penyusunan laporan Forum Konsultasi Publik	Dokumen	1
2	Tersedianya Sertifikat Diklat, Kursus, Workshop, Webinar tahun 2026	Mengikuti Diklat, Kursus, Workshop, Webinar pengembangan kompetensi teknis tahun 2026	Dokumen	4
3	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Dokumen	2
4	Tersedianya laporan mengikuti pelaksanaan Apel Pagi hari Senin	Mengikuti pelaksanaan apel pagi hari Senin	Kegiatan	44
5	Tersedianya laporan Pelaksanaan GEMA	Melaksanakan GEMA	Kegiatan	44
6	Tersedianya laporan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan diluar tugas pokok	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan diluar tugas pokok	Laporan	10
7	Tersedianya data sasaran hasil Validasi DTSEN di Kecamatan Wilayah Hulu	Menyediakan data sasaran hasil Validasi DTSEN di Kecamatan Wilayah Hulu	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
dan Penanganan Warga Negara
Migran Korban Tindak Kekerasan**

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional



SUNARKO, SST., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 197109071994011002



FADILLAH, S.Sos
Kelas IX
NIP. 19770711 202521 1 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PEBRIANI ASTUTY S., S.Kom**
Jabatan : **PENATA LAYANA OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUNARKO, SST. M.SI**
Jabatan : **Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,

**Kepala Bidang Rehabilitasi
Sosial dan Penanganan Warga
Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan**



SUNARKO, SST. M.SI

Pembima. IV/a

NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,

Penata Layanan Operasional



PEBRIANI ASTUTY S., S.Kom

Kelas IX

NIPPPK. 198402072025212017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya penyediaan sandang bagi PPKS diluar panti sosial.	Data penerima bantuan sandang dan laporan aktifitas penyediaan sandang bagi PPKS diluar panti sosial	Laporan	24
2.	Tersedianya data dukung pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberian Bantuan Sandang	Data dukung Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberian Bantuan Sandang bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	Bulan	12
3.	Terpenuhinya data dukung Tingkat Kematangan Organisasi Bidang Rehabilitasi Sosial	Jumlah dokumen data dukung meliputi Dokumen RKA/DPA, Laporan Realisasi Keuangan dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)	Dokumen	20
4.	Tersedianya Sertifikat Diklat, Kursus, Workshop, Webinar tahun 2026	Jumlah Sertifikat Pengembangan Kompetensi Teknis Tahun 2026	Dokumen	4
5.	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Jumlah dokumen PK dan IKI	Dokumen	2
6.	Tersedianya laporan mengikuti pelaksanaan Apel Pagi hari Senin	Jumlah dokumentasi mengikuti Apel Pagi hari Senin	Kegiatan	44
7.	Tersedianya laporan Pelaksanaan GEMA	Jumlah dokumentasi pelaksanaan GEMA	Kegiatan	44
8.	Tersedianya laporan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan diluar tugas pokok	Jumlah laporan dan dokumentasi pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Kegiatan	20

9.	Terlaksananya input e-pantau Bidang Rehsos dan PWNMKTk tepat waktu	Jumlah sub kegiatan yang diinput di e-pantau setiap bulan	Dokumen	36
----	--	---	---------	----

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,

**Kepala Bidang Rehabilitasi
Sosial dan Penanganan Warga
Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan**



SUNARKO, SST. M.SI

Pembima. IV/a

NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,

Penata Layanan Operasional



PEBRIAN ASTUTY S., S.Kom

Kelas IX

NIPPPK. 198402072025212017



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DINIE YULIANIE, SE**

Jabatan : **PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RIADI HADIWINOTO, S. Hut**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat pada jenis layanan **Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana**.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik pada jenis

layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana.

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG PENANGANAN
KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN
TAMAN MAKAM PAHLAWAN**



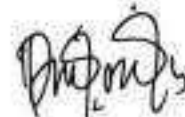
RIADI HADIWINOTO, S. Hut

Pembina (IV/a)

NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,

PENATA LAYANAN OPERASIONAL



DINIE YULIANIE, SE

Golongan IX

NIPPPK. 198310302025212015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana	Jumlah Masyarakat Korban Bencana yang tercukupi kebutuhan dasarnya	Orang	200
2.	Meningkatkan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban bencana	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban Bencana	Persen	100
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Penanganan Korban bencana dan Pengelolaan TMP	Jumlah Pelayanan kepada masyarakat korban bencana	Kegiatan	12
4.	Tersedianya dokumen Perencanaan, Pedoman, Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Bidang Penanganan Korban bencana dan Pengelolaan TMP	Jumlah Dokumen Tingkat Kematangan Organisasi Bidang PKBPTMP	Dokumen	100
5.	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau Bidang Penanganan Korban bencana dan Pengelolaan TMP	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Dokumen	400

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN
 BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN
 MAKAM PAHLAWAN**


RIADI HADIWINOTO, S.Hut
 Pembina (IV/a)
 NIP. 196812212003121002

Tenggarong, 5 Januari 2026
 Pihak Pertama,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL


DINIE YULIANIE, SE
 Golongan IX
 NIPPPK. 198310302025212015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MASITAH D**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM, SE.MM**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**

SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina, IV/a

NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran

MASITAH D

Kelas V

NI PPPK. 198505122025212029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Jumlah data dukung penurunan Angka Kriminalitas Tahun 2023 dan Tahun 2024 serta Indeks Persaingan Usaha	3	Dokumen
2.	Terpenuhinya sapras dalam pemenuhan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah sapras dalam pemenuhan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1	Laporan
3.	Tingkat Kepatuhan PK, IKI, SKP dan SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan PK, IKI, SKP dan SPT Tahunan	4	Dokumen
4.	Terlaksananya Proses Administrasi Surat Menyurat yang Efektif dan Efisien pada Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah Administrasi Surat Menyurat pada Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian melalui Aplikasi Srikandi dan Non Srikandi	50	Surat
5.	Tersedianya Data Dukung yang efektif dan akuntabel pada Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah Rencana Penyusunan Sub Kegiatan, Realisasi Anggaran dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sub Kegiatan	20	Dokumen
6.	Terlaksananya Proses Administrasi Pengelolaan BMD yang Efektif dan Efisien pada Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah Penataan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	5	Kegiatan
7.	Terlaksananya kegiatan monitoring dan pelaksanaan perintah atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rapat-Rapat, Apel ASN, Gerakan Etam Mengaji (Gema) dan Melaksanakan Perintah Atasan	20	Kegiatan
8.	Tersedianya Dokumen Manajemen Risiko Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Manajemen Risiko Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	4	Dokumen
9.	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	3	Kegiatan

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran

SERAPUL ANAM, SE.MM
Pembina, IV/a
NIP. 196810111994031007

MASITAH D
Kelas V
NI PPPK. 198505122025212029



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EVI YANTI**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM, SE.MM**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**


SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina, IV/a

NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran



EVI YANTI

Kelas V

NI PPPK. 198206292025212012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Jumlah data dukung Partisipasi Ekonomi	1	Dokumen
2.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Kepatuhan Penyampaian PK, IKI, SKP dan SPT Tahunan	4	Dokumen
3.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Tata Kelola Arsip Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian melalui Aplikasi Srikandi dan Non Srikandi	150	Surat
4.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	3	Dokumen
5.	Tersusunnya Dokumen Standar Operasional (SOP) dan Data Pengembangan Kompetensi SDM Secara Sistematis	Jumlah Tersusunnya Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Data Pengembangan Kompetensi SDM Secara Sistematis	2	Dokumen
6.	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau Sekretariat	Tingkat Ketepatan Waktu Input e-Pantau Subbag Umum Ketatalaksanaan & Kepegawaian dan telah di Verifikasi 100% per tanggal 10 Setiap Bulan	1	Kegiatan
7.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Disiplin Pegawai, Gema dan Melaksanakan Perintah Atasan	Jumlah Monitoring, Evaluasi, Disiplin Pegawai, Gema dan Melaksanakan Perintah Atasan	20	Kegiatan

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**


SERAPUL ANAM, SE.MM
Pembina, IV/a
NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


EVI YANTI
Kelas V
NI PPPK. 198206292025212012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUKZIZATU RAHMAN**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM, SE.MM**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua;

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**


SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina IV/a
NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


MUKZIZATU RAHMAN

Kelas V
NI PPPK. 198010022025211022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya data dukung Indeks Persaingan Usaha dan Indeks Tata Kelola Pengadaan	Jumlah data dukung Indeks Persaingan Usaha dan Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	Dokumen
2.	Terpenuhinya sapras dalam pemenuhan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah Sapras dalam pemenuhan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1	Laporan
3.	Tingkat Kepatuhan PK, IKI, SKP dan SPT Tahunan	Jumlah Tingkat Kepatuhan PK, IKI, SKP dan SPT Tahunan	4	Dokumen
4.	Terlaksananya Proses Administrasi Surat Menyurat yang Efektif dan Efisien pada Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah Administrasi Surat Menyurat pada Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian melalui Aplikasi Srikandi dan Non Srikandi	20	Surat
5.	Terlaksananya Proses Administrasi Pengelolaan BMD yang Efektif dan Efisien pada Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah Rencana Penyusunan Sub Kegiatan, Realisasi Anggaran dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sub Kegiatan	25	Dokumen
6.	Terlaksananya kegiatan monitoring dan pelaksanaan perintah atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rapat-Rapat, Apel ASN, Gerakan Etam Mengaji (Gema) dan Melaksanakan Perintah Atasan	25	Kegiatan
7.	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah Tingkat Ketepatan waktu Input E-Pantau Sekretariat dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	3	Kegiatan

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**

SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina IV/a
NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,

Pengadministrasi Perkantoran

MUKZIZATU RAHMAN

Kelas V
NI PPPK. 198010022025211022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NETTY NURHUDA**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM, SE.MM**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**


SERAPUL ANAM, SE.MM
Pembina, IV/a
NIP. 196810111993031007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


NETTY NURHUDA
Kelas V
NI PPPK. 197601062025212007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Jumlah Data dukung Rekapitulasi Data Pasien dari Rumah Sakit dan Puskesmas yang Mengakses Klinik Jiwa /Psikiater	2	Dokumen
2.	Tingkat Kepatuhan PK, IKI, SKP dan SPT Tahunan	Jumlah Tingkat Kepatuhan PK, IKI dan SKP dan SPT Tahunan	4	Dokumen
3.	Terlaksananya Proses Administrasi Surat Menyurat yang Efektif dan Efisien pada Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah Administrasi Surat Menyurat pada Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian melalui Aplikasi Srikandi dan Non Srikandi	20	Surat
4.	Tersedianya Data Dukung yang efektif dan akuntabel pada Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah Rencana Penyusunan Sub Kegiatan, Realisasi Anggaran dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sub Kegiatan	10	Dokumen
5.	Terlaksananya kegiatan monitoring dan pelaksanaan perintah atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rapat-Rapat, Apel ASN, Gerakan Etam Mengaji (Gema) dan Melaksanakan Perintah Atasan	20	Kegiatan
6.	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Umtapeg	Jumlah Laporan Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko Umtalpeg PerTriwulan	4	Dokumen

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**



SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina, IV/a
NIP. 196810111993031007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran



NETTY NURHUDA

Kelas V
NI PPPK. 197601062025212007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUADDAH**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM, SE.MM**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen resiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan resiko yang dapat menghambat tujuan organisasi
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**



SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina, IV/a
NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran



MUADDAH

Kelas V
NI PPPK. 197605282025212009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dokumen IKI, PK dan SKP	3	Dokumen
2.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Terlaksananya Laporan SPT Tahunan	1	Laporan
3.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Arsip Surat	10	Arsip
4.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Berkas SPJ yang masuk	30	Dokumen
5.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Dokumen SOP terkait Administrasi Keuangan	1	Dokumen
6.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Monitoring, Evaluasi, Disiplin Pegawai, Gema dan Melaksanakan Perintah Atasan	20	Kegiatan

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**



SERAPUL ANAM, SE.MM
Pembina, IV/a
NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran



MUADDAH
Kelas V
NI PPPK. 197605282025212009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FARAH SINTA**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM, SE.MM**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen resiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan resiko yang dapat menghambat tujuan organisasi
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**



SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina, IV/a
NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran



FARAH SINTA

Kelas V
NI PPPK. 198206192025212015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dokumen IKI, PK dan SKP	3	Dokumen
2.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Terlaksananya Laporan SPT Tahunan	1	Laporan
3.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dokumen Pajak yang dilaporkan	30	Dokumen
4.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Laporan hasil rekap	8	Laporan
5.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Berkas SPJ yang masuk	50	Dokumen
6.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Dokumen SOP terkait Administrasi Keuangan	1	Dokumen
7.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Monitoring, Evaluasi, Disiplin Pegawai, Gema dan Melaksanakan Perintah Atasan	20	Kegiatan

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**



SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina, IV/a
NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,

Pengadministrasi Perkantoran



FARAH SINTA

Kelas V
NI PPPK. 198206192025212015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DESSY MAKHDALISSA**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM, SE.MM**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**


SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina, IV/a

NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


DESSY MAKHDALISSA

Kelas V

NI PPPK. 198606202025212015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Jumlah data dukung Rekapitulasi Data Pasien Dari Dinkes Yang Bersumber Dari Rumah Sakit dan Puskesmas Yang Mengakses Klinik Jiwa / Psikiater	2	Dokumen
2.	Terlaksananya Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Tingkat Kepatuhan PK, IKI, SKP dan SPT Tahunan	4	Dokumen
3.	Terlaksananya Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Administrasi Surat Menyurat melalui Aplikasi Srikandi dan Melaksanakan Tata kelola Arsip Non Srikandi	8	Kegiatan
4.	Terlaksananya Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Monitoring, Evaluasi, Disiplin Pegawai, Gema dan Melaksanakan Perintah Atasan	20	Kegiatan
5.	Terlaksananya Tingkat Ketepatan Waktu Kepatuhan Input e-Pantau Sekretariat	Jumlah Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepagawain dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	1	Kegiatan

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**

SERAPUL ANAM, SE.MM
Pembina, IV/a
NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


DESSY MAKHDALISSA
Kelas V
NI PPPK. 198606202025212015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NILA MAHDIANI**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM, SE.MM**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

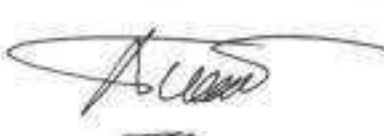
Tenggarong, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**


SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina, IV/a
NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran



NILA MAHDIANI
Kelas V
NI PPPK. 197706022025212011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Data Dukung Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Jumlah Data Dukung Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	1	Dokumen
2.	Terlaksananya Tingkat Kepatuhan Pk,IKI dan SKP dan SPT Tahunan	JumlahTingkat Kepatuhan PK, IKI dan SKP dan SPT Tahunan	4	Dokumen
3.	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat pada Sub Bagian Umum Kettalaksanaan dan Kepegawaian. Melalui Aplikasi Srikandi dan Non Srikandi	Jumlah Administrasi Surat Menyurat pada Sub Bagian Umum Ketetalaksanaan dan Kepegawaian melalui Aplikasi Srikandi dan Non Srikandi	200	Surat
4.	Terlaksananya Data dukung akuntabel Pelaksanaan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sub kegiatan	Jumlah Data dukung akuntabel Pelaksanaan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sub Kegiatan	3	Dokumen
5.	Terlaksananya Monitoring Evaluasi,Displin Pegawai,Gema danMelaksanakan Perintahan Atasan	Jumlah,Monitoring Evaluasi, Disiplin Pegawai, Gema dan Melaksanakan Perintah Atasan	20	Kegiatan

Tenggarong, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**

SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina, IV/a

NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran



NILA MAHDIANI

Kelas V

NI PPPK. 197706022025212011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAYA SARI**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM, SE.MM**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**


SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina, IV/a
NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


MAYA SARI

Kelas V
NI PPPK. 198403192025212021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Data Dukung Laporan PPKS dan Total Jabatan Strategis di Lembaga Eksekutif	Jumlah Data dukung Laporan PPKS dan Total Jabatan Strategis di Lembaga Eksekutif	2	Dokumen
2.	Terlaksanannya Tingkat Kepatuhan PK, IKI, SKP dan SPT Tahunan	Jumlah Dokumen Kepatuhan PK, IKI, SKP dan SPT Tahunan	4	Dokumen
3.	Terlaksanannya Administrasi Surat Menyurat pada Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian melalui Aplikasi Srikandi	Jumlah Administrasi Surat Menyurat pada Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian melalui Aplikasi Srikandi	50	Surat
4.	Tersedianya Data dukung akuntabel Rencana Penyusunan, Realisasi Anggaran dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sub Kegiatan	Jumlah Data dukung akuntabel Rencana Penyusunan, Realisasi Anggaran dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sub Kegiatan	10	Dokumen
5.	Tersusunnya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan data pengembangan kompetensi SDM secara sistematis	Jumlah tersusunnya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan data pengembangan kompetensi SDM secara sistematis	2	Dokumen
6.	Terlaksanannya Monitoring, Evaluasi, Disiplin Pegawai, Gema dan Melaksanakan Perintah Atasan	Jumlah Monitoring, Evaluasi, Disiplin Pegawai, Gema dan Melaksanakan Perintah Atasan	20	Kegiatan
7.	Terlaksanannya Tingkat Ketepatan Waktu Input E-Pantau Sekretariat dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Jumlah Tingkat Ketepatan Waktu Input E-Pantau Sekretariat dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	2	Kegiatan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FARIDAH**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM, SE.MM**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**


SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina, IV/a
NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


FARIDAH

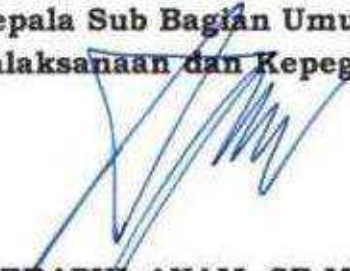
Kelas V
NI PPPK. 198601212025212027

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Jumlah data dukung Sekolah Non SLB yang menerapkan kebijakan pendidikan inklusi	2	Dokumen
2.	Tingkat Kepatuhan PK,IKI, SKP dan SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan PK, IKI,SKP dan SPT Tahunan	4	Dokumen
3.	Terlaksananya Proses Administrasi Surat Menyurat yang Sfektif dan Efisien pada Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah Administrasi Surat Menyurat pada Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian melalui Aplikasi Srikandi Non Srikandi	100	Surat
4.	Tersedianya Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Data dukung akuntabel Pelaksanaan Surat Pertanggung Jawaban Sub Kegiatan	3	Dokumen
5.	Terlaksananya kegiatan monitoring dan pelaksanaan perintah atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rapat-Rapat, Apel ASN, Gerakan Etam Mengaji (Gema) dan Melaksanakan Perintah Atasan	20	Kegiatan

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**


SERAPUL ANAM, SE.MM
Pembina, IV/a
NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


FARIDAH
Kelas V
NI PPPK. 198601212025212027



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI ASTUTI**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM, SE.MM**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**



SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina, IV/a
NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran



SRI ASTUTI

Kelas V
NI PPPK. 198509072025212022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Pemenuhan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Jumlah data dukung siswa disabilitas yang bersekolah di sekolah non- SLB	2	Dokumen
2.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Tingkat Kepatuhan PK, IKI, SKP dan SPT Tahunan	4	Dokumen
3.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Administrasi Surat Menyurat pada Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian melalui Aplikasi Srikandi non srikandi	10	Surat
4.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Data dukung akuntabel Pelaksanaan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sub Kegiatan	10	Dokumen
5.	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Monitoring, Evaluasi, Disiplin Pegawai, Gema dan Melaksanakan Perintah Atasan	20	Kegiatan
6.	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau Sekretariat	Jumlah Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	1	Kegiatan

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran

SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina, IV/a

NIP. 19680111994031007

SRI ASTUTI

Kelas V

NI PPPK. 198509072025212022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINI PURWANTI
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



LUCY YULIDASARI, M.Psi

Pembina (IV/a)

NIP. 19750717 200801 2 028



RINI PURWANTI

NIPPPK. 197706242025212009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mencatat, Mengadimistrasikan dan Merekap (list) Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kec. Loa Kulu dan Loa Janan)	Jumlah Data dukung	Laporan	23
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Loa Kulu)	Tingkat ketersisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Pemenuhan Data Dukung Dokumen dan Penatausahaan (eviden) Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi

Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026
Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


RINI PURWANTI

NIPPPK. 197706242025212009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINI PURWANTI
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SY. GINA FATHILLAH, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



SY. GINA FATHILLAH, SE.,M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 196810181996032004



RINI PURWANTI

NIPPPK. 197706242025212009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mencatat, Mengadimistrasikan dan Merekap (list) Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kec. Loa Kulu dan Loa Janan)	Jumlah Data dukung	Laporan	23
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Loa Kulu)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Pemenuhan Data Dukung Dokumen dan Penatausahaan (eviden) Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL



SY. GINA FATHILLAH, SE., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 196810181996032004

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026
Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



RINI PURWANTI
NIPPPK. 197706242025212009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSIANWAR
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028


ROSIANWAR
NIPPPK. 19830909 202521 1 029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

N o	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mencatat, Mengadimistrasikan dan Merekap (list) Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kecamatan Muara Muntai, Muara Wis dan Kota Bangun)	Jumlah Data dukung	Laporan	31
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data LKS dan Karang Taruna Se-Kecamatan Kota Bangun)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Pemenuhan Data Dukung Dokumen dan Penatausahaan (eviden) Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026
Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028


ROSIANWAR
NIPPPK. 19830909 202521 1 029



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSIANWAR
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SY GINA FATHILLAH, SE., MSI
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 februari 2026

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SY GINA FATHILLAH, SE., MSI

Pembina (IV/a)

NIP. 19681018 199603 2 0004

ROSIANWAR

NIPPPK. 19830909 202521 1 029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

N o	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mencatat, Mengadimistrasikan dan Merekap (list) Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kecamatan Muara Muntai, Muara Wis dan Kota Bangun)	Jumlah Data dukung	Laporan	31
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data LKS dan Karang Taruna Se-Kecamatan Kota Bangun)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Pemenuhan Data Dukung Dokumen dan Penatausahaan (eviden) Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL



SY GINA FATHILLAH, SE., MSI
Pembina (IV/a)
NIP. 19681018 199603 2 0004

Kutai Kartanegara, 9 februari 2026
Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



ROSIANWAR
NIPPPK. 19830909 202521 1 029



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAMSUL ANUAR
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



LUCY YULIDASARI, M.Psi

Pembina (IV/a)

NIP. 19750717 200801 2 028



SAMSUL ANUAR

NIPPPK. 199101312025211030

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mencatat, Mengadimistrasikan dan Merekap (list) Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kecamatan Muara Badak, Marang Kayu dan Anggana)	Jumlah Data dukung	Laporan	32
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Muara Badak)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 197507172008012028

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026
Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


SAMSUL ANUAR
NIPPPK. 199101312025211030



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAMSUL ANUAR
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SY. GINA FATHILLAH, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



SY. GINA FATHILLAH, SE., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 196810181996032004



SAMSUL ANUAR

NIPPPK. 199101312025211030

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mencatat, Mengadimistrasikan dan Merekap (list) Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kecamatan Muara Badak, Marang Kayu dan Anggana)	Jumlah Data dukung	Laporan	32
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Muara Badak)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL



SY. GINA FATHILLAH, SE., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 196810181996032004

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026
Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



SAMSUL ANUAR
NIPPPK. 19910131 202521 1 030



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUDO DWI WINARNO BAMBANG PRIYANTO
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026
Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


YUDO DWI WINARNO BAMBANG PRIYANTO
NIPPPK. 197000521 202521 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mencatat, Mengadimistrasikan dan Merekap (list) Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat, Muara Kaman dan Samboja Barat)	Jumlah Data Dukung	Laporan	41
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Sebulu)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mencatat, Mengadimistrasikan dan Merekap (list) Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat, Muara Kaman dan Samboja Barat)	Jumlah Data Dukung	Laporan	41
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Sebulu)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
SOSIAL**


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026
Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


YUDO DWI WINARNO BAMBANG PRIYANTO
NIPPPK.197000521 202521 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUDO DWI WINARNO BAMBANG PRIYANTO
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SY GINA FATHILLAH, SE, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
SOSIAL



SY GINA FATHILLAH, SE, M.SI
Pembina (IV/a)
NIP. 19681018 199603 2 004

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026
Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



YUDO DWI WINARNO BAMBANG PRIYANTO
NIPPPK.19700521 202521 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mencatat, Mengadimistrasikan dan Merekap (list) Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat, Muara Kaman dan Samboja Barat)	Jumlah Data Dukung	Laporan	41
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Sebulu)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
SOSIAL



SY GINA FATHILLAH, SE., M.SI

Pembina (IV/a)
NIP. 19681018 199603 2 004

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026
Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



YUDO DWI WINARNO BAMBANG PRIYANTO

NIPPPK. 19700521 202521 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUNAIDI
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SY GINA FATHILLAH, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


SY GINA FATHILLAH, SE., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19681018 199603 2 004


JUVAIDI

NIPPPK. 197001032025211003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mencatat, Mengadimistrasikan dan Merekap (list) Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kecamatan Sebulu, Tenggarong Seberang dan Tenggarong)	Jumlah Data dukung	Laporan	46
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data LKS dan Karang Taruna Se-Kecamatan Kota Bangun Darat) dan LK3	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


SY GINA FATHILLAH, SE., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19681018 199603 2 004

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL


JILWAIDI
NIPPPK. 197001032025211003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUNAIDI

Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


LUCY YULIDA SARI, M.Psi

Pembina (IV/a)

NIP. 19750717 200801 2 028


JUNAIDI

NIPPPK. 197001032025211003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mencatat, Mengadimistrasikan dan Merekap (list) Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kecamatan Sebulu, Tenggarong Seberang dan Tenggarong)	Jumlah Data dukung	Laporan	46
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data LKS dan Karang Taruna Se-Kecamatan Kota Bangun Darat) dan LK3	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026
Pihak Kedua,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL


JUNAIDI
NIPPPK. 197001032025211003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIK HIDAYAT
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

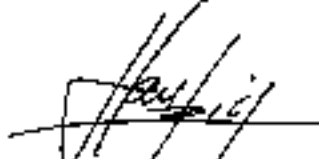
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


LUCY YULIDASARI, M.Psi

Pembina (IV/a)

NIP. 19750717 200801 2 028


TAUFIK HIDAYAT

NIPPPK. 19791213 202521 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mencatat, Mengadimistrasikan dan Merekap (list) Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kecamatan Tabang, Kembang Janggut dan Kenohan)	Jumlah Data Dukung	Laporan	39
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Koordinasi Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemcrintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Tabang)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

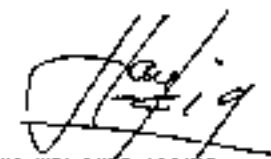
SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026
 Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


LUCY YULIASARI, M.Pai
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19750717200801 2 028


TAUFIK HIDAYAT
 NIPPPK. 19791213 202521 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIK HIDAYAT
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SY GINA FATHILLAH, SE. M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

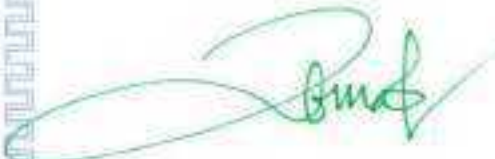
Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



SY GINA FATHILLAH, SE., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19681018 199603 2 004



TAUFIK HIDAYAT

NIPPPK. 19791213 202521 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mencatat, Mengadimistrasikan dan Merekap (list) Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kecamatan Tabang, Kembang Janggut dan Kenohan)	Jumlah Data Dukung	Laporan	39
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Koordinasi Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Tabang)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

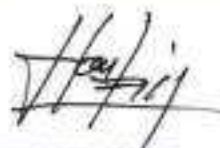
NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL



SY GINA FATHILLAH, SE., M.SI
Pembina (IV/a)
NIP. 19681018 199603 2 004

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026
Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



TAUFIK HIDAYAT
NIPPPK. 19791213 202521 1 009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURAYAH
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SY GINA FATHILLAH, SE, M.SI
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



SY GINA FATHILLAH, SE, M.SI

Pembina (IV/a)

NIP. 19681018 199603 2 004



SURAYAH

NIPPPK.19840211 202521 2 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mencatat, Mengadimistrasikan dan Merekap (list) Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kecamatan Muara Jawa, Sanga-Sanga dan Samboja)	Jumlah Data Dukung	Laporan	26
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Samboja Barat)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

SY GINA FATHILLAH, SE, M.SI
Pembina (IV/a)
NIP. 19681018 199603 2 004

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026
Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SURAYAH

NIPPPK.19840211 202521 2 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURAYAH
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

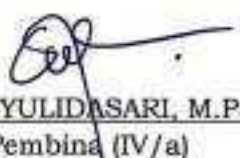
Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


LUCY YULIDASARI, M.Psi

Pembina (IV/a)

NIP. 19750717 200801 2 028


SURAYAH

NIPPPK.19840211 202521 2 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mencatat, Mengadimistrasikan dan Merekap (list) Pemenuhan Laporan dan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (Wilayah Kecamatan Muara Jawa, Sanga-Sanga dan Samboja)	Jumlah Data Dukung	Laporan	26
2	Pemenuhan Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bidang Dayasos)	Dokumen	12
3	Pemenuhan Data Dukung pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengelola Data Karang Taruna Se-Kecamatan Samboja Barat)	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan Bidang Dayasos	Persen	100
4	Membantu Input e-Pantau Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau Bidang Dayasos dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026
Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


LUCY YULIDASARI, M.Psi

Pembina (IV/a)

NIP. 19750717 200801 2 028


SURAYAH

NIPPPK.19840211 202521 2 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NORTI FREDY**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**



MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN**



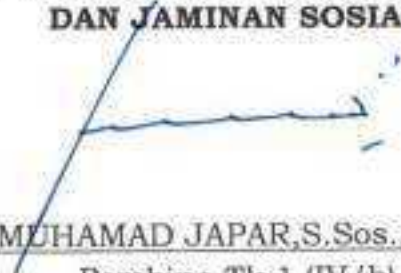
NORTI FREDY
Kelas V
NIPPPK. 198705112025212025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kewenangan Bidang Linjamsos	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kewenangan Bidang Linjamsos	Laporan	12
2	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang efektif, Akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta meningkatkan kualitas pelayanan public kewenangan Bidang Linjamsos	Terpenuhnya IKI, PK, Nilai Budaya Kerja Organisasi, Gema Alkitab, Terlaksananya Tugas sesuai Arahan Atasan baik tertulis dan Lisan	Laporan	12
3	Terlaksananya Keberdayaan dan Kemampuan PPKS dalam menjalankan fungsi sosial kewenangan Bidang Linjamsos	Terlaksananya administrasi Laporan BPNT, Terlaksananya Administrasi peneri ma UEP	Laporan	2

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
 DAN JAMINAN SOSIAL**


MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si
 Pembina Tk.1 (IV/b)
 NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
 PERKANTORAN**


NORTI FREDY
 Kelas V
 NIPPPK. 198705112025212025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAMSUL HADI**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RIADI HADAWINOTO, S. Hut**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN
BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan;
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKAN) dan;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PKBPTMP



RIADI HADIWINOTO, S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN**



SAMSUL HADI
Golongan (V)
NIPPPK. 198709202025211023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana	Jumlah masyarakat Korban bencana yang mendapat bantuan	Orang	200
2	Meningkatkan Indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban Bencana	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban Bencana	Persen	100
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang PKBTMP	Jumlah Pelayanan yang diberikan	Kegiatan	24
4	Tersedianya dokumen Perencanaan, Pedoman, Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Bidang Penanganan Korban bencana dan Pengelolaan TMP	Jumlah Dokumen Tingkat Kematangan Organisasi Bidang PKBPTMP	Dokumen	50
5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau Bidang Penanganan Korban bencana dan Pengelolaan TMP	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Laporan	12

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PKBPTMP



Riadi Hadiwinoto, S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN



SAMSUL HADI
Golongan (V)
NIPPPK. 198709202025211023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A. SYURIANTA HF**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN BIDANG PENANGANAN
KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RIADI HADIWINOTO, S. Hut**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Restra) Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan pada perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Mewujudkan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Terwujudnya penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanganan Korban Bencana guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat, Indeks kepuasan masyarakat dan Indeks pelayanan

masyarakat.

5. Terwujudnya ASN yang Relegius, Berakhlak Mulia, dan Cinta AL-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
6. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENANGANAN
KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN
TAMAN MAKAM PAHLAWAN**



RIADI HADIWINOTO, S.Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 19681221003121002

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN BIDANG
PENANGANAN KORBAN BENCANA
DAN PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN**



A.SYURIANTA HE
Golongan (V)
NIP. 196811182025211007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif Kebencanaan	Indeks Risiko Bencana	Nilai	120
2	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana	Jumlah Masyarakat Korban Bencana yang tercukupi kebutuhan dasarnya	Orang	1500
3	Meningkatkan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban bencana	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban Bencana	Persen	100
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Penanganan Korban bencana dan Pengelolaan TMP	Jumlah Pelayanan kepada masyarakat korban bencana	Kegiatan	50
5	Tersedianya dokumen Perencanaan, Pedoman, Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Bidang Penanganan Korban bencana dan Pengelolaan TMP	Jumlah Dokumen Tingkat Kematangan Organisasi Bidang PKBPTMP	Dokumen	50
6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Bidang Penanganan Korban bencana dan Pengelolaan TMP	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko bidang PKBPTMP per Triwulan	Dokumen	4

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN
 BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN
 MAKAM PAHLAWAN**



RIADI HADIWINOTO, S.Hut
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19681221003121002

Pihak Pertama,
**PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
 BIDANG PENANGANAN KORBAN
 BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN
 MAKAM PAHLAWAN**



A.SYURIANTA HF
 Golongan (V)
 NIP. 196811182025211007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAIRULLAH
Jabatan : PENGELOLA UMUM OPERASIONAL BIDANG PENANGANAN
KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RIADI HADIWINOTO, S. Hut
Jabatan : KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja(Renja) Tahun 2026 dan Rencana Strategis(RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Terwujudnya penyelenggaraan layanan dasar sesuai standar pelayanan minimal (SPM) bidang penanganan korban bencana guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan

masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks kepuasan masyarakat dan indeks pelayanan publik.

5. Terwujudnya ASN yang relegius, berakhlak mulia dan cinta Al-Quran melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
6. Melakukan Kordinasi Monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke prangkat daerah pengampu Indikator kinerja dan Tim penyusun, Monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PKBPTMP

RIADI HADIWINOTO S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP.196812212003121002

Pihak Pertama,
**PENGELOLA UMUM
OPERASIONAL BIDANG PKBPTMP**

KHAIRULLAH
Golongan(1)
NIPPPK 198410182025211029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Penyaluran Bantuan Korban Bencana	Jumlah masyarakat Korban bencana yang mendapat bantuan	Jiwa	200
2	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban bencana	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban Bencana	Persen	100
3	Pemberian Pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Pelayanan yang diberikan	Kegiatan	24
4	Tersedianya dokumen Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen	Dokumen	50
5	Penyediaan data Laporan SPJ individu	Jumlah laporan	Laporan	12

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PKBPTMP

RIADI HADIWINOTO.S.Hut
Pembina(IVa)
NIP.196812212003121002

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026
Pihak Pertama,
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL
BIDANG PKBPTMP

KHAIRULLAH
Golongan (1)
NIPPPK 198410182025211029



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EVI NOVIANTI**

Jabatan : **PENGELOLA UMUM OPERASIONAL BIDANG PENANGANAN
KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RIADI HADIWINOTO, S. Hut**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana kerja (RENJA) TAHUN 2026 Dan rencana Strategis (RENTRA) tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah.
2. Terwujudnya Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Terwujudnya penyelenggaraan layanan dasar sesuai standar pelayanan minimal (SPM) bidang penanganan korban bencana guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui

pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat, indeks kepuasan masyarakat dan indeks pelayanan publik;

5. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
6. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PKBPTMP

RIADI HADIWINOTO S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
**PENGELOLA UMUM OPERASIONAL
BIDANG PKBPTMP**

EVI NOVANTI
Golongan (1)
NIPPPK.198511212025212017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Penyalur bantuan korban bencana	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan	Jiwa	200
2	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanganan Korban bencana	Pencapaian Standar pelayanan minimal (SPM) penanganan korban bencana	Persen	100
3	Pemberi Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah pelayanan yang diberikan	Kegiatan	24
4	Tersedianya dokumen pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik	Jumlah dokumen	Dokumen	50
5	Penyediaan data laporan SPJ Individu	Jumlah laporan	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PKBPTMP



RIADI HADIWINOTO, S.Hut
emblna (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL
BIDANG PKBPTMP



EVI NOVIANTI
Golongan (I)
Nippk. 198511212025212017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BUDIYANTO**

Jabatan : **PENGELOLA UMUM OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUNARKO,SST.,M.SI**

Jabatan : **Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
dan Penanganan Warga Negara
Migran Korban Tindak Kekerasan**



SUNARKO, SST.,M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL



BUDIYANTO
Kelas I
NIPPPK. 198012082025211011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya penyediaan perbekalan kesehatan di shelter Dinas Sosial	Data penerima perbekalan kesehatan dan laporan aktifitas pemberian perbekalan kesehatan di shelter Dinas Sosial	Laporan	24
2.	Tersedianya dokumen Tindak Lanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasi SKM	Dokumen	1
3.	Tersedianya Sertifikat Diklat, Kursus, Workshop, Webinar tahun 2026	Jumlah Sertifikat Pengembangan Kompetensi Teknis Tahun 2026	Dokumen	4
4.	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Dokumen	2
5.	Tersedianya laporan mengikuti pelaksanaan Apel Pagi hari Senin	Jumlah dokumentasi mengikuti Apel Pagi hari Senin	Kegiatan	44
6.	Tersedianya laporan Pelaksanaan GEMA	Jumlah dokumentasi pelaksanaan GEMA	Kegiatan	44
7.	Tersedianya laporan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan diluar tugas pokok	Jumlah laporan dan dokumentasi pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Kegiatan	10

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG REHABILITASI
SOSIAL DAN PENANGANAN WARGA
NEGARA MIGRAN KORBAN
TINDAK KEKERASAN**

PENGELOLA UMUM OPERASIONAL



SUNARKO, SST., M.Si

Pembina, IV/a

NIP. 197109071994011002



BUDIYANTO

Kelas I

NIPPPK. 198012082025211011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YULIANA**
Jabatan : **PENGELOLA UMUM OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM, SE.MM**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian


SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina, IV/a
NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,
Pengelola Umum Operasional



YULIANA

Golongan 1
NI PPPK. 199111212025212038

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Pemenuhan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Pemenuhan Data Dukung Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	1	Dokumen
2.	Tersedianya Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Terlaksananya Tingkat Kepatuhan PK, IKI, SKP, dan SPT Tahunan	4	Dokumen
3.	Tersedianya Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat pada Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian melalui Aplikasi Srikandi dan Arsip SPJ	10	Surat
4.	Tersedianya Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Arsip Pada Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian	7	Kegiatan
5.	Tersedianya Data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Monitoring, Evaluasi, Disiplin Pegawai, Gema dan Melaksanakan Perintah Atasan	20	Kegiatan
6.	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau Sekretariat	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau Sekretariat	1	Kegiatan

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

SERAPUL ANAM, SE.MM
Pembina, IV/a
NIP. 196910111994031007

Pihak Pertama,
Pengelola Umum Operasional

YULIANA
Golongan I
NI PPPK. 199111212025212038



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NUR HABIBI, S.Hut**

Jabatan : **PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI, ST, MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FAHRUL, ST, MM
Pembina / IV/a
NIP. 19781208200921001

Pihak Pertama,
**PENATA LAYANAN
OPERASIONAL**



NUR HABIBI, S. Hut
Kelas IX
NI PPPK. 197105092025211027

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksana Pembuatan Rekomendasi BPJS PBPB PB PEMDA	Jumlah Dokumen	Dokumen	300
2.	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kewenangan bidang Linjamsos	Jumlah Laporan	Laporan	12
3.	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang Efektif, Akuntabel, dan Adaptif dalam mendukung capaian Kinerja serta peningkatan Kualitas pelayanan Publik kewenangan Bidang Linjamsos	2. IKI 3. SPT Tahunan 4. PK 5. IKM - Bpjs Kesehatan	Laporan	12

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL**


AHMAD FARUJI, ST, MM
Pembina / IV/a
NIP. 19781208200921001

Pihak Pertama,
**PENATA LAYANAN
OPERASIONAL**


NUR HABIBI, S. Hut
Kelas IX
NI PPPK. 197105092025211027



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NUR HABIBI, S.Hut**
Jabatan : **PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL**



MUHAMAD JAPAR, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
**PENATA LAYANAN
OPERASIONAL**



NUR HABIBI, S.Hut
Kelas IX
NI PPPK. 197105092025211027

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

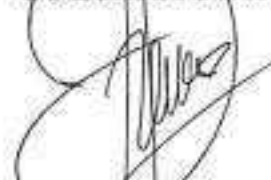
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksana Pembuatan Rekomendasi BPJS PBPB PB PEMDA	Jumlah Dokumen	Dokumen	300
2.	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kewenangan bidang Linjamsos	Jumlah Laporan	Laporan	12
3.	Terlaksananya Pemenuhan Data Dukung yang Efektif, Akuntabel, dan Adaptif dalam mendukung capaian Kinerja serta peningkatan Kualitas pelayanan Publik kewenangan Bidang Linjamsos	2. IKI 3. SPT Tahunan 4. PK 5. IKM - Bpjs Kesehatan	Laporan	12

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
 JAMINAN SOSIAL**



MUHAMAD JAPAR, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 196907051989031008

Pihak Pertama,
**PENATA LAYANAN
 OPERASIONAL**



NUR HABIBI, S.Hut
Kelas IX
NI PPPK. 197105092025211027



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIDUANSYAH D.**
Jabatan : **OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUKANDAR, SST., MPSSP**
Jabatan : **KEPALA UPTD. LOKA BINA KARYA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

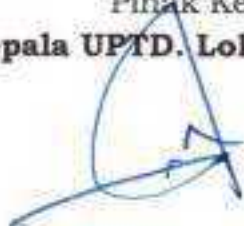
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala UPTD. Loka Bina Karya



SUKANDAR, SST., MPSSP
Pembina, IV/a
NIP. 196804141992011004

Pihak Pertama,
Operator Layanan Operasional



RIDUANSYAH D.
NI PPPK. 197704082025211066

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya Administrasi pelayanan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam menjalankan fungsi sosial	Jumlah pelayanan Bimbingan Fisik Mental, Spritual dan Sosial	12	Kegiatan
2.	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Publik Di UPTD Loka Bina Karya	12	Kegiatan
3.	Pengadministrasi data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah Pengadministrasi data Dukung Data Dokumen pendukung Tingkat Kematangan Organisasi UPTD Loka Bina Karya	5	Dokumen



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AWANG RUSLAN FAZRIEN**
Jabatan : **OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **KUN DWI ROHMANI,S.Sos**
Jabatan : **KEPALA UPTD PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK DINAS
SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya administrasi pelayanan rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam menjalankan fungsi sosial pada UPTD Odah Ngasoh Kanak	Jumlah pelayanan bimbingan fisik mental, sosial dan spritual	kegiatan	12
2.	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Publik UPTD Odah Ngasoh Kanak	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Publik UPTD Odah Ngasoh Kanak	kegiatan	12
3.	Terlaksananya Pengadministrasi data Dukung organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Pengadministrasi Data Dokumen pendukung Tingkat Kematangan Organisasi UPTD Odah Ngasoh Kanak	Dokumen	5

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD PELAYANAN SOSIAL
ASUHAN ANAK DINAS SOSIAL



KUN DWI ROHMANI, S.Sos
Pembina Tingkat I III/d
NIP. 196802271994022002

Pihak Pertama,
OPERATOR LAYANAN
OPERASIONAL



AWANG RUSLAN FAZRIEN
Kelas V
NI PPPK. 199405162025211099

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan;
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKAN) dan;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA UPTD PELAYANAN SOSIAL
ASUHAN ANAK DINAS SOSIAL**



KUN DWI ROHMANI, S.Sos
Pembina Tingkat I III/d
NIP. 196802271994022002

Pihak Pertama,
**OPERATOR LAYANAN
OPERASIONAL**



AWANG RUSLAN FAZRIEN
Kelas V
NI PPPK. 199405162025211099